



RENCANA KERJA (**RENJA**) TAHUN 2024

SEKRETARIAT DAERAH ACEH



**BIRO ADMINISTRASI PIMPINAN
SEKRETARIAT DAERAH ACEH**

**KANTOR GUBERNUR / SEKRETARIAT DAERAH ACEH
GEDUNG C. LANTAI 3.
JL. T. NYAK ARIEF NO. 219 BANDA ACEH 23114**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniannya, sehingga kami dapat menyelesaikan tugas menyusun Rencana Kerja (Renja) Setda Aceh Tahun 2024.

Rencana Kerja Setda Aceh Tahun 2024 lebih diarahkan sebagai wujud implementasi terhadap Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Aceh (RPA) 2023-2026. Penyusunan Renja Sekretariat Daerah Aceh disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta penyusunan Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Semoga Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan pada Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, terima kasih.

Banda Aceh, Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH ACEH


BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670722 199603 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renja	1
1.1.2 Proses Penyusunan Renja	2
1.1.3 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya	2
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2021	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Tahun 2021 dan Capaian Renstra Setda Aceh.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Setda Aceh	52
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Setda Aceh.....	54
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPA.....	67
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	67
BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH	68
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	68
3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh	77
3.3 Program dan Kegiatan.....	78
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH	89
BAB V PENUTUP	90
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan landasan hukum di bidang perencanaan pembangunan daerah yang memberikan arahan tentang tata cara perencanaan pembangunan daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dengan melibatkan masyarakat. Dalam peraturan dimaksud juga mewajibkan setiap organisasi perangkat daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana Pembangunan Tahunan SKPA, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Aceh (Renja-SKPA) adalah Dokumen Perencanaan SKPA untuk periode 1 (satu) Tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPA.



1.1.2 Proses Penyusunan Renja

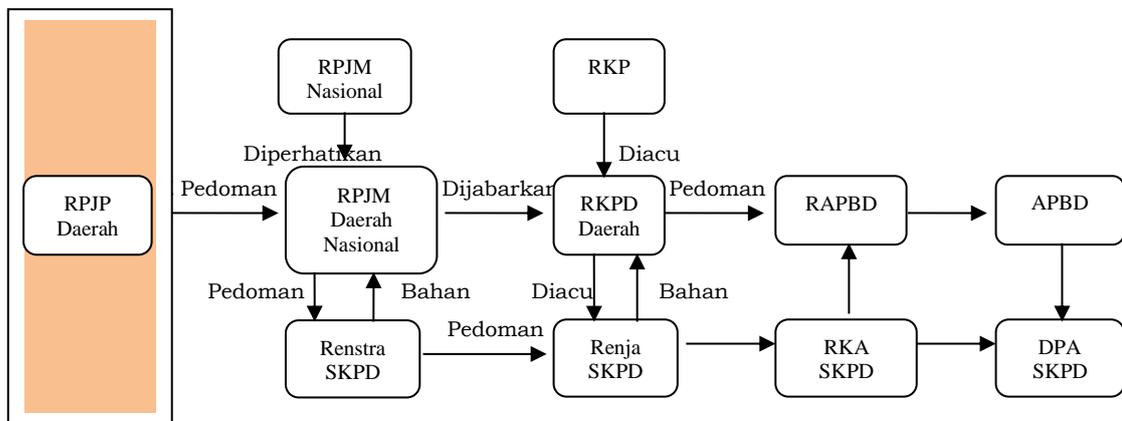
Dalam proses penyusunan Renja Sekretariat Daerah Aceh mengacu kepada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPA. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Sekretariat Daerah Aceh disusun secara simultan/paralel dengan penyusunan Rancangan Awal RKPA, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Daerah menetapkan Renja untuk menjadi pedoman di lingkungan biro-biro dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada tahun anggaran berkenaan.

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja Sekretariat Daerah Aceh yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan.
- b. Penyusunan rancangan awal.
- c. Penyusunan rancangan.
- d. Pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah.
- e. Perumusan rancangan akhir
- f. Penetapan renja perangkat daerah.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya.

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh adalah penjabaran dari Renstra Setda yang merupakan rencana jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan yang dituangkan dalam Renja Setda kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.



1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 adalah:

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,



Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- h. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- i. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
- j. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2023;
- k. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;

1.3. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 dimaksudkan untuk menentukan arah dalam penetapan prioritas program dan kegiatan tahun 2024 yang dapat menjadi acuan dalam penyusunan dan pengajuan anggaran yang berbasis kinerja.

2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh tahun 2024 adalah:

- a. Untuk menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsi dalam rangka mewujudkan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2024;
- b. Menyediakan dokumen Perencanaan Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024;



- c. Sebagai dokumen perencanaan tahunan yang akan dijadikan acuan bagi biro-biro dalam penyusunan anggaran tahun anggaran 2024 sesuai dengan tugas dan fungsi.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 ini, terdiri dari 5 (lima) Bab dengan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang mengenai pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antar dokumen, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2022.

Berisikan tentang evaluasi pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2022 dan capaian Renstra, analisis kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Aceh, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, Review terhadap rancangan awal RKPA serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh

Berisikan tentang Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan Saran Renja Setda Aceh, Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Sekretariat Daerah

Berisikan tentang program beserta indikator keberhasilan program (outcome) serta indikator kegiatan (output), serta pendanaan.

Bab V Penutup

Berisikan uraian penutup tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya



maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai kebutuhan.



BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2022 dan Capaian Renstra Setda Aceh Tahun 2017-2022

Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh tahun 2024 merupakan penjabaran perencanaan tahunan dengan tetap mempedomani Rencana Pembangunan Aceh tahun 2023-2026 dan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026 serta Rencana Kerja Biro-biro di lingkungan Setda Aceh.

Hasil Evaluasi dan Realisasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 berdasarkan tingkat capaian keuangan serta realisasi keuangan berdasarkan program Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditampilkan Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Tingkat capaian keuangan berdasarkan
Program Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2023

No	INSTANSI	JUMLAH (Rp.)		%
		ANGGARAN BELANJA	REALISASI	
1	2	3	4	5
1	Sekretariat Daerah Aceh	227.330.145.055,00	225.899.445.996,33	99,37

Sumber :Laporan Keuangan Pemerintah Aceh Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa realisasi anggaran belanja Sekretariat Daerah Aceh pada tahun 2022 mencapai rata-rata sebesar **99,37%** dari alokasi anggaran sebesar **Rp. 227.330.145.055,00,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 225.899.445.996,33,-**, yang dialokasikan ke dalam 21 program.

Disamping tingkat capaian keuangan berdasarkan program Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2023, juga dilakukan Evaluasi Pelaksanaan Renja Setda Tahun 2023 dan Capaian Renstra Tahun 2023-2026 sebagaimana dalam Tabel 2.2 sebagai berikut:



Tabel 2.2
Pengukuran Kinerja Sasaran Strategis
Sasaran strategis Birokrasi yang efektif dan efisien

No.	Indikator Kinerja	Tahun 2023			Target Akhir Renstra 2023-2026	% Capaian Tahun 2023 Terhadap Target Akhir Renstra
		Target	Realisasi	% Tingkat Capaian		
1	Indeks reformasi birokrasi	65	64,09	98,6	68	90,27
2	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	64	66,01	103,14	71	90,38
3	Indeks Pelayanan Publik	3,65	4,01	109,8	4,50	89,11
4	Laju inflasi	3+/-1 (yoy)	1,53 (yoy)	100	100	100
5	Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	2,8000 (Tinggi)	2,9168 (Tinggi)	100	2,9500	98
6	Penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah	2,30 Ratio	2,30 Ratio	100	9,195	25,01
7	Persentase pertumbuhan keuntungan daerah (BUMA) melalui kebijakan daerah	1,5%	115%	113,5	6	25
8	Rasio Paket Selesai Pemilihan	90	90,22	100,24	100	90
9	Indeks penyelesaian fasilitasi perundang-undangan dan bantuan hukum	90%	95%	105,5	80	105,5
Rata-rata tingkat capaian				103,79%		

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 9 indikator kinerja sasaran strategis “Birokrasi yang Efektif dan Efisien” diperoleh rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 103,79%. Penjabaran indikator kinerja di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Indeks reformasi birokrasi

Berdasarkan Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan indikator perolehan indeks Reformasi Birokrasi ditargetkan 65. Dalam peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, Biro Organisasi melakukan sejumlah Fasilitasi penyusunan Road Map dan evaluasi RB.



2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh

Perkembangan Nilai Sistem AKIP Pemerintah Aceh menunjukkan tren positif dan terus mengalami peningkatan seiring dengan komitmen Gubernur Aceh dan Sekretaris Daerah Aceh untuk memperbaiki kinerja birokrasi di lingkungan Pemerintah Aceh. Pada tahun 2023, Manajemen Kinerja telah diterapkan secara menyeluruh pada semua unit kerja di lingkungan Pemerintah Aceh sesuai Instruksi Gubernur Aceh Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Manajemen Kinerja di lingkungan Pemerintah Aceh. Dengan penerapan manajemen kinerja ini diharapkan mampu mendorong kinerja pembangunan Aceh dan sekaligus meningkatkan kualitas implementasi Sistem AKIP Pemerintah Aceh. Nilai SAKIP Pemerintah Aceh tahun 2023 yaitu 66,01 dengan kategori B.

3. Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Sasaran Strategis terwujudnya kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukur dengan Indikator Kinerja Persentase Organisasi tepat fungsi dan tepat ukur dengan target 89%. Kegiatan ini dilakukan melalui fasilitasi, klarifikasi, evaluasi, dan asistensi penyusunan produk hukum kelembagaan. Pemerintah Aceh dalam hal Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, yang mengatur mengenai variabel untuk menentukan ukuran organisasi dan dengan berlakunya Permendagri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kelembagaan yang tepat fungsi dan tepat ukuran diperlukan kriteria yang jelas dalam persyaratan dalam pembentukan lembaga baru.

Dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud diharapkan penataan kelembagaan, baik pembentukan lembaga baru maupun peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan sesuai kebutuhan berdasarkan asas proporsionalitas. Disamping itu juga pembentukan lembaga baru harus terlebih dahulu dilakukan analisa organisasi yang didasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dengan



mempertimbangkan optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Hal ini dalam rangka untuk menghindari adanya ukuran organisasi yang tidak seimbang dengan beban urusan pemerintahan yang dilaksanakan dan tumpang tindih tugas dan fungsi antar lembaga. Pada Tahun 2023 pemerintah Aceh menargetkan indeks pelayanan publik dengan nilai 3,65 sedang realisasi pada tahun 2023 sebesar 4,01 dengan persentase realisasi capaian sebesar 109,8

4. Laju Inflasi

Indikator Laju Inflasi Aceh pada posisi Desember tahun 2023 sebesar 1,53 % yang dibandingkan dengan capaian Desember tahun 2022 (YoY) sebesar 5,89% berada pada kondisi stabil. Kondisi inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2020 diangka 3,59% yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi Covid-19 ikut mempengaruhi kondisi perekonomian Aceh secara umum. Seiring dengan pergerakan ekonomi mulai tahun 2021 tingkat inflasi secara optimis menurun dan target kinerja tahun selanjutnya ditetapkan dengan optimisme pada angka dibawah 3 %. Dibutuhkan koordinasi intensif untuk menggalang kerjasama para pihak dalam pengendalian inflasi daerah dengan mengoptimalkan Tim Pengendalian Inflasi daerah (TPID)

5. Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Aceh (LPPA) Tahun Anggaran 2023 merupakan amanat Pasal 42 ayat (1) huruf g Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan kepada



Gubernur Aceh untuk menyampaikan capaian kinerja Pemerintah Aceh tahunan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

6. Penyelesaian pemasangan PBU terhadap Penetapan PBU prioritas pasca Permendagri batas daerah

Penegasan Batas Daerah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah dengan tujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Dalam Pasal 3 Ayat (4) disebutkan bahwa penegasan batas daerah terdiri atas: (1) batas daerah di darat; dan (2) batas daerah di laut.

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri nomor 126/2408/BAK tanggal 29 April 2021 hal Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah, Kementerian Dalam Negeri menugaskan Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah untuk melaksanakan pertemuan antara Tim Penegasan Batas Daerah (PBD) Pusat dengan Tim PBD Aceh dan Tim PBD Kabupaten/Kota di Aceh pada tanggal 4 s.d 6 Mei 2021.

Selanjutnya Tim Percepatan Penyelesaian Penegasan Batas Daerah bersama Tim Penegasan Batas Daerah Aceh melakukan fasilitasi penyelesaian penegasan batas daerah antar-kabupaten/kota di Aceh berupa pertemuan yang dilakukan di Banda Aceh dan Jakarta dengan hasil akhir seluruh segmen batas kabupaten/kota disepakati bersama untuk diusulkan dalam Peraturan Dalam Negeri atau diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan titik/garis batas. Pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2021 dilakukan Penandatanganan Berita Acara dan Peta Kesepakatan 20 Segmen Batas Daerah antar Kepala Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Aceh.

7. Persentase pertumbuhan keuntungan daerah (BUMA) melalui kebijakan daerah



Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis peningkatan Kinerja Keuangan BUMA pada tahun 2023 mengalami peningkatan dengan Peningkatan Total Laba BUMA dari target yang telah ditetapkan.

Secara umum kondisi BUMA lebih baik dari tahun sebelumnya. Capaian kategori Baik ini disebabkan peningkatan peolehan laba BUMA, meskipun masih banyak potensi yang dapat digali untuk memperoleh peningkatan Pendapatan Daerah (PAA).

8. Rasio Paket Selesai Pemilihan

Sampai dengan akhir tahun 2023, total paket tender, tender cepat dan seleksi yang dilelang pada Rencana Umum Pengadaan (RUP) berjumlah sebanyak 583 paket dengan jumlah total anggaran Rp. 987.187.336.788,- dan total paket tender, tender cepat dan seleksi yang diumumkan pada aplikasi SPSE Provinsi Aceh selesai sampai pada tahapan penetapan pemenang adalah sebanyak 526 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 918.722.930.387,-. Rinciannya antara lain paket konsultasi sebanyak 138 paket dengan total anggaran Rp. 54.160.690.251,-, paket konstruksi sebanyak 35 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 828.672.296.148,-, paket barang sebanyak 29 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 25.104.904.307,- serta paket jasa lainnya sebanyak 9 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 10.785.039.681,-

Persentase pelaksanaan tender barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada tahun 2023 dapat direalisasikan sebanyak 526 paket dengan total anggaran sebesar Rp. 918.722.930.387,- atau sebesar 90,22% dari total paket yang masuk ke dalam Rencana Umum Pengadaan. Dalam hal ini, pencapaian pada tahun anggaran 2023 mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun-tahun sebelumnya dikarenakan beberapa faktor antara lain pagu total APBA 2023 yang menurun dibandingkan dengan tahun-tahun anggaran sebelumnya yang berpengaruh terhadap alokasi belanja pengadaan barang/jasa, serta perubahan metode pengadaan dari tender/tender



cepat/seleksi dialihkan dengan menggunakan e-purchasing atau melalui katalog elektronik baik nasional, sektoral dan lokal.

9. Indeks penyelesaian fasilitasi perundang-undangan dan bantuan hukum

Pada dasarnya Biro Hukum merupakan suatu unit kerja yang memiliki tugas utama pembentukan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bantuan hukum di Pemerintah Aceh.

Salah satu persyaratan utama untuk mewujudkan pelayanan bantuan hukum tersebut adalah diperlukannya sebuah rencana strategis pembangunan yang tepat, jelas dan terarah, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat sasaran.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah

Peraturan Gubernur Aceh 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh merupakan unsur staf Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. Pelaksanaan dan pengoordinasian tugas perangkat Aceh;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan Aceh;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil Negera pada Perangkat Aceh;



- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan kinerja Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2022 relatif tidak menemukan adanya kendala yang berarti. Semuanya dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat Capaian Kinerja dapat digambarkan dengan indikator-indikator sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Aceh, secara sederhana Untuk mengukur capaian kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah Aceh dapat diidentifikasi berdasarkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Aceh sebagai berikut:

1. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang menyampaikan LPPD tepat waktu.
2. Skor dan Status LPPD.
3. Persentase Kecamatan yang telah menerapkan PATEN.
4. Persentase produk hukum daerah yang diundangkan atau ditetapkan.
5. Persentase penyelesaian sengketa hukum Pemerintah Aceh yang diselesaikan.
6. Persentase produk hukum Pemerintah Aceh yang disajikan dalam JDIH.
7. Persentase rekomendasi/kebijakan/naskah dibidang pendidikan, agama, kesehatan dan adat istiadat yang dimanfaatkan untuk pengambilan kebijakan pemerintah.
8. Prosentase peningkatan total laba BUMA (PD, BPR Mustaqim dan PT. Bank Aceh Syariah).
9. Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
10. Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh.



11. Persentase Pemerintah Kab/Kota yang mendapat predikat rating SAKIP “CC” ke atas.
12. Persentase organisasi Perangkat Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur.
13. Perolehan indeks Reformasi Birokrasi.
14. Persentase informasi dan dokumentasi penyelenggaraan Pemerintah Aceh yang disebarluaskan kepada masyarakat melalui media cetak, elektronik dan media social.
15. Persentase penyelesaian dokumen/naskah dinas tepat waktu sesuai dengan SOP.
16. Persentase kegiatan pimpinan yang difasilitasi.
17. Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan.

Pencapaian kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 berdasarkan Indikator Kinerja Utama dapat digambarkan sebagaimana Tabel T.C.30 (lampiran).

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Aceh.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh, Sekretaris Daerah Aceh merupakan unsur staf Gubernur Aceh, Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan dan pengoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas perangkat Aceh serta pelayanan administratif.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat Daerah Aceh mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan kebijakan pemerintahan Aceh;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas SKPA;



- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan Aceh;
- d. Pelayanan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada SKPA;
- e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Gubernur yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Aceh merupakan Sekretariat Daerah dengan Tipe A, dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang membawahi 3 (tiga) asisten dengan tingkat masing-masing asisten membawahi 3 (tiga) Biro. Setiap Biro membawahi 3 (tiga) Bagian, dan masing-masing Bagian membawahi 3 (tiga) sub bagian. Selain membawahi 3 (tiga) Asisten dan 9 (sembilan) Biro, Sekretaris Daerah Aceh secara Administratif mengkoordinasikan 3 (tiga) Staf Ahli Gubernur, yaitu:

- a. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
- b. Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan dan Pembangunan dan
- c. Staf Ahli Bidang Keistimewaan Aceh, Sumber Daya Manusia dan Hubungan Kerjasama.

Secara rinci susunan Organisasi Sekretariat Daerah Aceh dapat di jelaskan sebagai berikut:

1. Sekretaris Daerah, membawahi :

2. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari:

a. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, membawahi:

1) Bagian Pemerintahan, terdiri dari:

- a. Subbag Administrasi Pemerintahan dan Fasilitaso Penataan Wilayah;
- b. Subbag Pemerintahan Umum; dan
- c. Subbag Tata Usaha.



- 2) Bagian Otonomi Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbag Administrasi Kepala Daerah dan DPRD;
 - b. Subbag Pengembangan Otonomi Daerah dan Penataan Urusan; dan
 - c. Subbag Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan.
- 3) Bagian Kerjasama, terdiri dari:
 - a. Subbag Kerjasama Antar Pemerintah;
 - b. Subbag Kerjasama Badan Usaha/Swasta; dan
 - c. Subbag Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama.

b. **Biro Hukum**, membawahi:

- 1) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Aceh, terdiri dari:
 - a. Subbag Penyusunan Produk Hukum Pengaturan;
 - b. Subbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan; dan
 - c. Subbag Dokumentasi, Sosialisasi dan Naskah Hukum Lainnya.
- 2) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/Kota, terdiri dari:
 - a. Subbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah I;
 - b. Subbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah II;
 - c. Subbag Produk Hukum Kabupaten/Kota Wilayah III.
- 3) Bagian Bantuan Hukum, terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha;
 - b. Subbag Litigasi; dan
 - c. Subbag Non Litigasi dan Hak Asasi Manusia.

c. **Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat**, membawahi:

- 1) Bagian Keistimewaan dan Keagamaan, terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha;
 - b. Subbag Sarana dan Prasarana Keistimewaa dan Keagamaan; dan
 - c. Subbag Kelembagaan Bina Keistimewaan dan Keagamaan.
- 2) Bagian Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar, terdiri dari:
 - a. Subbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar I;



- b. Subbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar II; dan
 - c. Subbag Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar III.
- 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar, terdiri dari:
- a. Subbag Kesehatan;
 - b. Subbag Sosial; dan
 - c. Subbag Pendidikan.

3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari:

a. Biro Perekonomian, membawahi:

1) Bagian Kebijakan Perekonomian, terdiri dari:

- a. Subbag Analisis Ekonomi Makro;
- b. Subbag Analisis Ekonomi Mikro; dan
- c. Subbag Tata Usaha.

2) Bagian Sumber Daya Alam, terdiri dari:

- a. Subbag Sumber Daya Alam Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan;
- b. Subbag Sumber Daya Alam Pertambangan dan Lingkungan Hidup; dan
- c. Subbag Sumber Daya Alam Energi dan Air.

3) Bagian BUMD dan BLUD, terdiri dari:

- a. Subbag Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha;
- b. Subbag Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi; dan
- c. Subbag Badan Layanan Umum Daerah.

b. Biro Administrasi Pembangunan, membawahi:



- 1) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBA;
 - b. Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN; dan
 - c. Subbag Tata Usaha.
- 2) Bagian Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah, terdiri dari:
 - (a) Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah I;
 - (b) Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah II; dan
 - (c) Subbag Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah III.
- 3) Bagian Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Subbag Analisis Capaian Kinerja Pembangunan Daerah;
 - b. Subbag Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, dan
 - c. Subbag Kebijakan Pembangunan Daerah.

c. Biro Pengadaan Barang dan Jasa, membawahi:

- a. Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:
 1. Subbag Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa;
 2. Subbag Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
 3. Subbag Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri dari:
 1. Subbag Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 2. Subbag Tata Usaha dan Pengembangan Sistem Informasi; dan
 3. Subbag Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa.
- c. Bagian Pembinaan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa, terdiri dari:



1. Subbag Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Subbag Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa; dan
3. Subbag Pendampingan, Konsultasi dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa.

d. Asisten Administrasi Umum, membawahi:

a. Biro Organisasi, terdiri dari:

- 1) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri dari:
 - a. Subbag Kelembagaan Provinsi;
 - b. Subbag Kelembagaan Kabupaten/Kota; dan
 - c. Subbag Analisis Jabatan.
- 2) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari:
 - a. Subbag Reformasi Birokrasi;
 - b. Subbag Akuntabilitas Kinerja; dan
 - c. Subbag Budaya Kerja dan Pelayanan Perpustakaan.
- 3) Bagian Tatalaksana, terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha;
 - b. Subbag Tatalaksana Pemerintahan; dan
 - c. Subbag Pelayanan Publik.

b. Biro Administrasi Pimpinan, membawahi:

- 1) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah, terdiri dari
 - a. Subbag Perencanaan dan Pelaporan Sekretariat Daerah;
 - b. Subbag Kepegawaian Sekretariat Daerah; dan
 - c. Subbag Tata Usaha.



- 2) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan, terdiri dari:
 - a. Subbag Penyiapan Materi Pimpinan;
 - b. Subbag Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Pimpinan; dan
 - c. Subbag Dokumentasi Pimpinan.

- 3) Bagian Protokol, terdiri dari:
 - a. Subbag Acara;
 - b. Subbag Tamu dan Pelayanan Aspirasi Masyarakat; dan
 - c. Subbag Keprotokolan.

c. Biro Umum, membawahi:

- 1) Bagian Rumah Tangga, terdiri dari:
 - a. Subbag Urusan Rumah Tangga Gubernur;
 - b. Subbag Urusan Rumah Tangga Wakil Gubernur; dan
 - c. Subbag Urusan Dalam dan Pengelolaan Kendaraan.
- 2) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a. Subbag Keuangan dan Verifikasi Sekretariat Daerah;
 - b. Subbag Akuntansi dan Penatausahaan Aset; dan
 - c. Subbag Penggunaan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Sekretariat Daerah.
- 3) Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
 - a. Subbag Tata Usaha Biro;
 - b. Subbag Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah; dan
 - c. Subbag Persuratan dan Arsip.

Komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh, baik yang memangku jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum menurut golongan sebagaimana dalam **Tabel 2.18** berikut ini :



Tabel 1.1
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Golongan Ruang

No	Uraian	Jumlah	Jenis Kelamin		Golongan			
			L	P	I	II	III	IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Sekretaris Daerah Aceh	1	1	-	-	-	-	1
2	Asisten	3	3	-	-	-	-	3
3	Staf Ahli Gubernur	3	3	-	-	-	-	3
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	35	21	14	-	2	24	9
5	Biro Hukum	27	17	10	-	1	19	7
6	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra	32	17	15	-	3	21	8
7	Biro Perekonomian	32	16	16	-	2	21	9
8	Biro Administrasi Pembangunan	26	17	9	-	1	18	7
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	76	65	11	-	4	59	13
10	Biro Organisasi	29	15	14	-	2	19	8
11	Biro Administrasi Pimpinan	56	43	13	-	3	36	17
12	Biro Umum	173	132	41	5	72	93	3
Total		493	350	143	5	90	310	86

Sumber Data : Biro Administrasi Pimpinan, Februari 2023

Dari tabel 1.1 di atas, jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh secara kuantitas dan penyebarannya relatif sudah mencukupi. Namun demikian secara kualitas masih perlu ditingkatkan sesuai dengan bidang tugas yang diemban baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional. Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis kelamin, didominasi oleh laki-laki yang berjumlah 350 orang atau 70,99%, apabila dibandingkan dengan pegawai perempuan yang berjumlah 143 orang atau 29,01%.

Berdasarkan golongan, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh didominasi oleh golongan III sebanyak 310 PNS atau sebesar 62,88%, golongan II sebanyak 90 PNS atau sebesar 18,26%, golongan IV sebanyak 86 PNS atau sebesar 17,44% dan golongan I sebanyak 5 PNS atau sebesar 1,01%.



Tabel 1.2
Komposisi Aparatur Sipil Negara Sekretariat Daerah Aceh
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Uraian	Jumlah	Tingkat Pendidikan						
			SD	SL TP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Sekretaris Daerah	1		-	-	-	-	1	-
2	Asisten	3		-	-	-	-	1	2
3	Staf Ahli Gubernur	3		-	-	-	1	2	-
4	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	35		-	3	1	16	14	1
5	Biro Hukum	27		-	1	-	15	9	2
6	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesra	32		-	6	1	17	7	1
7	Biro Perekonomian	32		-	2	1	15	14	-
8	Biro Administrasi Pembangunan	26		-	1	-	10	13	-
9	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	76		-	8	2	34	30	1
11	Biro Organisasi	29		-	3	2	10	14	-
10	Biro Administrasi Pimpinan	56		-	6	1	27	20	1
12	Biro Umum	173	1	9	87	7	60	9	-
Total		491	1	9	117	15	206	132	7

Sumber Data : *Bagian Kepegawaian dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Biro Organisasi, Januari 2022*

Berdasarkan, tingkat pendidikan Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Daerah Aceh didominasi tingkat pendidikan Strata 1 sebanyak 206 orang atau 42,30%, tingkat pendidikan Strata 2 sebanyak 132 orang atau sebanyak 27,10%, tingkat SLTA sebanyak 117 orang atau 24,02%.

Tingkat pendidikan SD sebanyak 1 orang atau 0,21%, tingkat SLTP sebanyak 9 orang atau 1,85%, Tingkat D3 sebanyak 15 orang atau 3,08%, sedangkan tingkat pendidikan Strata 3 sebanyak 7 orang atau 1,44%.

Sekretariat Daerah yang terdiri dari 9 Biro mempunyai beberapa isu strategis yang berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Biro-biro di lingkungan Setda Aceh. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan untuk masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Kurangnya pemahaman dan komitmen bersama dalam melaksanakan aturan administrasi dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan daerah;



2. Kurang efektifnya pelaksanaan penataan wilayah di Aceh berimplikasi pada tumpang tindihnya pembangunan dan ketidakpastian data dasar pembangunan;
3. Kurangnya pemahaman penyelenggara pemerintah daerah terhadap mekanisme kerja sama daerah;
4. Tidak tersedianya diklat teknis yang berkesinambungan untuk mendukung peningkatan profesionalisme aparatur dalam mewujudkan tugas dan fungsi.
5. Penyaluran energi bersubsidi khususnya LPG 3 kg belum sepenuhnya tepat sasaran kepada penerima manfaat serta adanya pengecer yang tidak resmi menjual LPG 3 kg di atas HET.
6. Kualitas dan kapasitas transportasi yang ada belum memadai khususnya dalam mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif.
7. Peran dan fungsi badan usaha milik Aceh (BUMA) terhadap PAA dan Perekonomian Rakyat masih lemah;
8. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
9. Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dan pelaksana bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
10. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
11. Belum optimalnya pembinaan penguatan pengelola layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten/Kota
12. Implementasi SAKIP di jajaran Pemerintah Aceh, Kab/Kota belum optimal;
13. Implementasi Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh, Kab/Kota belum optimal;



14. Perlu adanya dukungan penguatan penyelenggaraan kehumasan pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika;
15. Belum lengkapnya standar operasional prosedur;
16. Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan masih lemah dan sarana penunjang belum memadai;
17. Tata kelola pemerintahan (*Good Governance dan Clean Government*) belum maksimal;
18. Tingkat kepuasan (*satisfaction*) masyarakat terhadap layanan pemerintah masih rendah;

2.3.1 Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah

1. Identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat pada tataran kebijakan sebagai berikut:

- a. Belum Semua SKPA menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan secara tepat administrasi, sasaran, mutu, waktu, dan manfaat
- b. Belum tertatanya peraturan Perundang-undangan dan produk hukum daerah.
- c. Belum optimalnya tugas dan fungsi koordinasi serta SDM dalam mendukung pembangunan bidang Pemerintahan, keistimewaan, ekonomi, pembangunan, dan administrasi umum.
- d. Belum optimalnya Koordinasi perumusan kebijakan lintas sektor/bidang dan wilayah.
- e. Koordinasi lembaga belum optimal; kurang mampu minimalisir ketidaksesuaian rencana dengan implementasi pembangunan;
- f. Belum adanya kebijakan pemberian reward dan punishment dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (sistem AKIP);



- g. Terbatasnya sarana prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. Terbatasnya jumlah anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dimiliki;
- i. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan;
- j. Penyelenggaraan otonomi daerah tingkat provinsi dan kab/kota belum optimal;
- k. Organisasi Perangkat Aceh belum tepat fungsi dan tepat ukuran (*right sizing*) sesuai dengan kebutuhan, kemampuan dan karakteristik serta amanat UUPA;
- l. Belum tersebarluasnya informasi pembangunan yang merata kepada masyarakat sampai ke pelosok-pelosok;
- m. Masih kurangnya kualitas pelayanan informasi publik;
- n. Masih adanya tumpang tindih tugas dan fungsi antar SKPA;
- o. Penyusunan dan penetapan Indikator kinerja yang belum terukur dan masih berorientasi pada anggaran belum berbasis kinerja;
- p. Disiplin, motivasi dan budaya kerja produktif, efisien, efektif masih perlu ditingkatkan.

2. Identifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat pada tataran kebutuhan teknis operasional:

- a. Masih rendahnya kompetensi dan distribusi SDM dalam penjabaran tugas dan fungsi belum merata;
- b. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
- c. Belum optimalnya tugas penyiapan kebijakan yang terkait bidang agama dan peran ulama, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat;



- d. Masih terbatasnya pemahaman pihak-pihak terkait langsung dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pemahaman komprehensif terhadap kebijakan, aplikasi maupun proses pelaksanaan;
- e. Perlu adanya pelatihan bagi tenaga pengelola JDIH dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi kepada masyarakat.
- f. Kapasitas aparatur pemerintahan kecamatan masih lemah dan sarana penunjang belum memadai;
- g. Rendahnya dukungan infrastuktur ekonomi;
- h. Masih ada SKPA yang belum tepat fungsi dan tepat ukur;
- i. Pelaksana reformasi birokrasi dan setiap SKPA belum optimal;
- j. Masih kurangnya sarana penyaluran informasi kepada masyarakat;
- k. Rendahnya kesadaran instansi dalam peyediaan informasi bagi masyarakat;
- l. Belum lengkapnya standar operasional pelayanan (SOP).

3. Identifikasi permasalahan pelayanan sekretariat pada tataran implemetasi program dan kegiatan

1. Sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Masih terbatasnya pemahaman SDM dalam pelayanan dan kegiatan serta monitoring evaluasi;
3. Masih kurangnya pemahaman tentang perubahan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yakni Perpres 16 Tahun 2018 maupun aturan turunannya;
4. Perlu dukungan penguatan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip dan etika pengadaan;
5. Belum optimalnya pengembangan dan peningkatan kompetensi SDM Aparatur bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;



6. Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha dan pelaksana bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah;
7. Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah;
8. Belum optimalnya pembinaan penguatan pengelola layanan pengadaan secara elektronik di Kabupaten/Kota.

2.3.2 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD

1. Tantangan

1. Koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan belum berjalan optimal;
2. Sistem, prosedur dan mekanisme kerja birokrasi belum terlaksana secara efektif dan efisien;
3. Etos dan disiplin kerja sumber daya aparatur yang efisien, efektif belum membudaya;
4. Sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi belum sesuai dengan standar kebutuhan;
5. Kompetensi dan distribusi sumber daya aparatur belum merata;
6. Sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan *reward and punishment* belum optimal.

2. Peluang

- a. Adanya kebijakan pemerintah untuk pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. Adanya komitmen pimpinan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah;
- c. Peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh terus dilakukan;



- d. Penguatan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui penerapan dokumen (Sistem AKIP) dalam rangka peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah terus diupayakan;
- e. Kuantitas Sumber Daya Aparatur dilingkungan Sekretariat Daerah mencukupi.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPA

Dalam RKPA Tahun 2024 Anggaran telah sesuai dengan Rancangan Awal RKPA, hal ini disebabkan program, kegiatan dan subkegiatan telah sesuai dengan kebutuhan, namun untuk besaran anggaran diajukan tidak sesuai dengan yang diajukan dikarenakan penyesuaian anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Kajian Usulan terhadap program dan kegiatan masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jejaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi SKPA. Sekretariat Daerah Aceh tahun 2024 tidak terdapat usulan program dan kegiatan dari kelompok masyarakat, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi yang terkait langsung dengan pelayanan Sekretariat Daerah Aceh.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DAERAH ACEH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2020-2024 adalah:

‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong’

Visi Misi tersebut di wujudkan melalui 9 (sebilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Nawa cita	
1.	Peningkatan kualitas manusia Indonesia
2.	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing
3.	Pembangunan yang merata dan berkeadilan
4.	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan
5.	Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa
6.	Penegakan Sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya
7.	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
8.	Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya
9.	Strategi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

Rencana Pembangunan Aceh (RPA) tahun 2023-2026 juga diarahkan untuk mendukung pencapaian visi, dan misi Pemerintah Aceh yaitu :

b. Visi

Visi Pemerintah Aceh, yaitu **“Aceh Yang Islami, Maju, Damai dan Sejahtera”**

Visi ini mengandung tiga kata kunci sebagai berikut :

1. **Islami** adalah kondisi masyarakat Aceh yang secara utuh menjalankan seluruh aspek kehidupan berdasarkan nilai-nilai Islam serta memiliki karakter dan akhlak mulia yang toleran, santun, taat beribadah, memiliki etika, mencintai perdamaian, memiliki



ketahanan dan daya juang tinggi, cerdas, taat aturan, kooperatif dan inovatif serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.

2. **Maju** adalah kondisi masyarakat Aceh yang memiliki berbagai keunggulan di segala bidang dan berperadapan tinggi sehingga mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional.
3. **Damai** adalah sebuah kondisi yang diharapkan oleh setiap manusia untuk memenuhi hak dasar terhadap kebutuhan sosial, politik, dan ekonominya dengan baik serta memiliki rasa aman.
4. **Sejahtera** adalah sebuah kondisi yang diharapkan setiap masyarakat mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual. Masyarakat Aceh yang sejahtera merupakan masyarakat yang makmur, berpenghasilan yang cukup, memiliki pendidikan, lapangan usaha, dan lapangan kerja yang layak, terbebas dari kemiskinan, memiliki rasa kepedulian yang tinggi, memiliki kualitas kesehatan dan didukung oleh kondisi lingkungan dan perumahan yang baik.

c. **Misi**

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, Pemerintah Aceh menetapkan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulai sesuai dengan nilai-nilai Islami;
2. Mewujudkan masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidup dalam aspek ekonomi, sosial dan spiritual;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Aceh yang aman, damai, dan bersatu;
5. Mewujudkan pembangunan yang berkualitas, maju, adil dan merata;
6. Mewujudkan Aceh yang lestari dan tangguh terhadap bencana.



Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dibentuk untuk melaksanakan fungsi pendukung urusan Pemerintahan Daerah, sehingga Program dan Kegiatan di Sekretariat Daerah Aceh mendukung Prioritas yang ke-9 yaitu Perdamaian dan Reformasi Birokrasi. Sembilan prioritas pembangunan RPJMA tahun 2017-2022 sebagaimana disajikan pada tabel 3.1

Tabel. 3.1
Prioritas Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026

NO.	Prioritas Pembangunan
1	Meningkatkan Pembangunan Demokrasi
2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional
3	Penguatan Adat Istiadat dan Pelaksanaan Syariat Islam Secara Kaffah
4	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Derajat Kesehatan
5	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat, Kemandirian Fiskal Daerah dan Ketahanan Pangan dalam upaya mengurangi dampak sosial Ekonomi COVID-19
6	Meningkatkan Percepatan Pemerataan Pembangunan yang Berkelanjutan dan Tangguh Bencana
7	Meningkatkan Penguatan Perdamaian

3.2 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, Sekretariat Daerah Aceh juga menetapkan beberapa sasaran yang akan dilaksanakan, Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh yang berkaitan dengan Biro-biro dilingkungan Pemerintah Aceh, maka Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 berdasarkan RPA Tahun 2023-2026 Sekretariat Daerah Aceh Sebagai berikut:



a. Tujuan

Mewujudkan kebijakan yang berkualitas, penguatan koordinasi serta pelayanan administratif dibidang Pemerintahan, Keistimewaan, Administrasi Umum serta Perekonomian dan Pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien

b. Sasaran

Sebagaimana salah satu tujuan Pembangunan Aceh Tahun 2023-2026 untuk “Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Berkualitas dan Fungsional”, memiliki sasaran “Meningkatnya tata kelola kelembagaan layanan administrasi pemerintahan serta layanan publik berbasis elektronik”. Untuk menunjang pencapaian salah satu sasaran pembangunan Aceh tersebut, serta sesuai dengan tugas, fungsi dan tujuan Sekretariat Daerah Aceh, maka disusun sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya nilai SAKIP;
2. Meningkatnya pemenuhan infrastruktur dasar masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas layanan acara, tamu, dan hubungan keprotokolan pimpinan;
4. Pengendalian Inflasi;
5. Meningkatnya nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD);
6. Meningkatnya jumlah paket yang selesai pemilihan;
7. Meningkatnya pembinaan dan jumlah kasus pengadaan barang/jasa yang diselesaikan;
8. Tersedianya qanun, peraturan gubernur dan keputusan gubernur yang sistematis dan berkualitas;
9. Terwujudnya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan komunitas masyarakat adat;
10. Meningkatnya pengarusutamaan gender dalam pembangunan.



3.3 Program dan Kegiatan

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Sekretariat Daerah Aceh Telah menyesuaikan Program, Kegiatan dan Subkegiatan berdasarkan Kemendagri dimaksud, dengan total 8 (delapan) Program, dengan total anggaran Rp. 167.568.492.921. Program dan kegiatan serta subkegiatan 2023 telah di input kedalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan akan menjadi Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Aceh tahun 2024.

Program pada Sekretariat Daerah Aceh yang direncanakan pada tahun 2024 sebagaimana berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
- b. Program Penataan Organisasi
- c. Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah
- d. Program Kesejahteraan Rakyat
- e. Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
- f. Program Perekonomian dan Pembangunan
- g. Program Kebijakan dan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa
- h. Program Kebijakan Administrasi Pembangunan

Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023 dan prakiraan maju tahun 2024 sebagaimana dalam lampiran Tabel T-C 33.



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

SEKRETARIAT DAERAH ACEH

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat Daerah Aceh merupakan salah satu bahan Perencanaan Anggaran, digunakan sebagai acuan dalam menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Tahun 2023. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Aceh berdasarkan Program, Kegiatan dan Subkegiatan serta pendanaan Biro-biro di lingkungan Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana lampiran Tabel 4.1.



BAB V

P E N U T U P

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2024 memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi Sekretariat Daerah Aceh, dan berpedoman kepada Renstra Sekretariat Daerah Aceh Tahun 2023-2026.

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Aceh ini sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024, dengan Renja pelaksanaan anggaran diharapkan dapat memberikan gambaran pelaksanaan program dan kegiatan pada Sekretariat Daerah Aceh, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdayaguna bagi Biro-biro dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh.

Program dan kegiatan Sekretariat Daerah Aceh Tahun Anggaran 2024 tersebut diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan setiap kebijakan terutama dalam hal penganggarnya dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas-tugas pelayanan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Biro dilingkungan Sekretariat Daerah Aceh. Selanjutnya Program dan Kegiatan yang akan ditetapkan diharapkan dapat menjadi pedoman dan dilaksanakan secara konsisten.

Banda Aceh, Februari 2024
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

BUSTAMI, SE, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.



TABEL 2.1 (TC-29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH ACEH S.D TAHUN 2023
PROVINSI ACEH

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi pengembangan SDM Biro Tapem	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi Bimtek/Pelatihan Bagi ASN Biro Pemotda	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Perkantoran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Fasilitasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Status LPPA	2,9500/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	95%	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	25%
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rasio penyelesaian pemasangan PBU terhadap jumlah kebutuhan PBU pasca Permendagri Batas Daerah	9,195	2,3	2,3	2,3	25%	2,3	2,3	25%
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi kebijakan pemerintah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	25%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen fasilitasi penataan wilayah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai/Status LPPA	2,9500/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	95%	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	25%
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen pengembangan otonomi dan penataan urusan	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	100%	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	80%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	25%
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar pemerintah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dengan badan usaha/swasta	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kerjasama daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	25%
4 01	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat									
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
4 01 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi Antar SKPA	Tersedianya Koordinasi Antar SKPA		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset dan dan sarana perkantoran	Terpeliharanya aset dan dan sarana perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	-Insentif Penceramah Kab/kota dalam rangka Safari Ramadhan Pemerintah Aceh (23 Kab/Kota) -Terfasilitasinya keberangkatan PHD (36 orang) -Terlaksananya Bimtek Pembekalan / Pembinaan Petugas Haji Aceh	- Meningkatkan jumlah Petugas Haji Daerah yang memahami tugas pokok sebagai TPHD - Adanya rekomendasi terkait dengan standarisasi penyelenggaraan bimbingan manasik Haji		(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	20%	(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	80,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4 01	Fasilitasi Kelembagaan Bima Spritual	-Terselenggaranya Peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (12 Bulan) -Peusijek Calon Jam'ah Haji Setda Aceh (15 orang)	Terselenggaranya Peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur Aceh dan Mushalla Meuligoe Wakil Gubernur Aceh	3 Mushalla	3 Mushalla	3 Mushalla	100%	3 Mushalla	9	80,00%
4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	- Rakor dan Sinkronisasi Kesra Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4 Rekomendasi, 4 Kegiatan,	-	-	-	-	4 Rekomendasi, 4 Kegiatan,	2 Rekomendasi, 2 Kegiatan,	50,00%
4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- Raker Pengurus DWP - Seminar Bidang Pendidikan, Ekonomi, Sosial Budaya - Peningkatan Kapasitas DWP Aceh - Peringatan HUT DWP Aceh - Kajian Rutin DWP Aceh	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 Rekomendasi, 5 Kegiatan,	2 Rekomendasi, 2 Kegiatan,	50,00%	
4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	- Lokakarya-Fokus Grup Diskusi Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00%	
4 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-Rakor Kesra kab/kota - Raker Bidang Kesra - Hut DW,Raker DW,Kajian Rutin DWP dan Seminar DW	111 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	1 Kegiatan	90,00%	
4 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-Terfasilitasinya Donor Darah SKPA - Rakor UKS dan Raker Kesehatan	2 Kegiatan, 1 Laporan	2 Kegiatan, 1 Laporan	2 Kegiatan, 1 Laporan	85%	2 Kegiatan, 1 Laporan	2 Kegiatan, 1 Laporan	85,00%	
4 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-Rakor Pendidikan dan Raker	- 1 Rekomendasi terkait pembinaan lembaga pendidikan - 5 kali Terlaksananya kegiatan Organisasi Mahasiswa	- 1. Rekomendasi - 1. Laporan Kegiatan	- 1. Rekomendasi - 1. Laporan Kegiatan	85%	- 1 Rekomendasi - 1 Laporan Kegiatan	- 3. Rekomendasi - 3. Laporan Kegiatan	60,00%	
Biro Hukum										
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	90%	Rp.1.402.043.997	#####	#####	93,15%	Rp -	Rp.2.804.087.994	Rp.3.115.653.327
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu, laporan keuangan dan laporan realisasi	90%	Rp.54.930.350	Rp.55.700.050	Rp.54.930.350	98,6%		Rp.109.860.700	Rp.122.067.444
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	90%	Rp.815.460.671	Rp.818.285.678	Rp.815.460.671	99,65%		Rp.1.630.921.342	Rp.1.812.134.824
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN Biro Hukum sertaTerpahaminya produk hukum oleh aparaturn dan masyarakat	90%	Rp.221.789.359	Rp.268.676.300	Rp.221.789.359	82,55%		Rp.443.578.718	Rp.492.865.242
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	90%	Rp.110.601.688	Rp.132.516.787	Rp.110.601.688	83,46%		Rp.221.203.376	Rp.245.781.529

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
5	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Rp.159.703.929	Rp.190.403.220	Rp.159.703.929	83,88%		Rp.319.407.858	Rp.354.897.620	
7	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	90%	Rp.39.558.000	Rp.39.600.000	Rp.39.558.000	99,89%		Rp.79.116.000	Rp.87.906.667	
4	01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk Hukum Kewenangan Aceh yang di fasilitasi, yang diselesaikan; Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasi/evaluasi yang dapat diselesaikan; dan Persentase dokumentasi hukum.	90%	Rp.7.817.381.372	#####	#####	98,30%	Rp	-	Rp.15.634.762.744	#####
4	01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terbentuknya Qanun Aceh, Pergub, Kepgub, serta produk dan dokumen hukum lainnya, terciptanya keselarasan produk hukum di daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi, serta Ketersediaan informasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif	90%	Rp.3.667.189.496	Rp.3.738.374.456	Rp.3.667.189.496	98,10%		Rp.7.334.378.992	Rp.8.149.309.991	
4	01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Perlindungan hukum bagi aparaturnya Pemerintah Aceh, perlindungan hukum bagi fakir miskin serta tersedianya laporan aksi HAM	90%	Rp.4.150.191.876	Rp.4.213.920.872	Rp.4.150.191.876	98,49%		Rp.8.300.383.752	Rp.9.222.648.613	
Biro Perekonomian												
4.	01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian Inflasi Daerah	17,00	16,00	17,00	116,00	682,35	2,15	134,15	789,12	
4.	01 06 1.01.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Tersedianya Kebijakan Perekonomian yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	16,00	15,00	16,00	16,00	100,00	85,00	116,00	725,00	
4.	01 06 1.01.01.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4	4,00	4	4,00	100,00	4	12,00	300,00	
4.	01 06 1.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12	11,00	12	12,00	100,00	12	35,00	291,67	
4.	01 06 1.02.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tersedianya Kebijakan Sumber Daya Alam yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	19,00	18,00	19,00	19,00	100,00	85,00	122,00	642,11	
4.	01 06 1.02.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	14	13,00	14	14,00	100,00	14	41,00	292,86	
4.	01 06 1.02.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	2,00	2	2,00	100,00	2	6,00	300,00	
4.	01 06 1.02.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3	3,00	3	3,00	100,00	3	9,00	300,00	
4.	01 06 1.03.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Tersedianya Kebijakan Pengembangan BUMD dan BLUD yang Sinergi	3,00	5,00	3,00	3,00	100,00	85,00	93,00	3100,00	
4.	01 06 1.03.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	3,00	1,00	1,00	100,00	1	5,00	500,00	
4.	01 06 1.03.02.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	1,00	1,00	1,00	100,00	1	3,00	300,00	
4.	01 06 1.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	1,00	1	1,00	100,00	1	3,00	300,00	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1	11 58	Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	95%		85%	70,01%	70,01%			
1	11 58	001.	Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	12 Kasus	6 Kasus	1 Kasus	11 Kasus	100,00%	17 Kasus	92%	
			Jumlah penyelesaian pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	90 Pengaduan/Sanggah		20 Pengaduan/Sanggah	70 Pengaduan/Sanggah		195 Pengaduan/Sanggah	95%	
1	11 58.	003.	Penyusunan dan Perumusan Pola Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha	4 Pola Kemitraan	1Pola Kemitraan	2 Pola Kemitraan	0%	0,00%	1 Pola Kemitraan	25%	
1	11 58.	004.	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh pengelola pengadaan barang dan jasa	12 Kompetensi	7 Kompetensi	4 Kompetensi	2 Kompetensi	50%	9 Kompetensi	60%
				679 orang	242 orang	38 orang	5 orang		247 Orang		
1	11 58.	005.	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah aparatur pengadaan yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa	12 Angkatan	1 Akt	4 Angkatan	0	0%	1 Angkatan	11%
				420 orang	47 orang	120 orang	0		47 orang		
1	11 59		Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP	80%		90%	76,87%	76,87%		
1	11 59	001.	Penyelenggaraan layanan pengguna sistem pengadaan secara elektronik	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi	1200 Penyedia	739 Penyedia	300 Penyedia	214 Penyedia	71%	953 Penyedia	80%
				Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi	Kab/Kota (276 ora	23 Kab/Kota (95 orang)	23 Kab/Kota (92 orang)	23 Kab/Kota	25%	23 Kab/Kota (95 orang)	35%
				Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik	450 Permasalahan	90 Permasalahan	150 Permasalahan	85 Permasalahan	57%	175 Permasalahan	38%
1	11 59	002.	Pembinaan dan pengelolaan sistem elektronik pengadaan barang/jasa	Jumlah pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Aceh	23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	20%	23 LPSE/UKPBJ	20%
				414 orang	74 orang	115 orang	0		74 orang		
1	11 59	004.	Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan secara elektronik	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	95%	3 Aplikasi	75%
1	11 59	005.	Pengembangan kebijakan dan sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa	Jumlah sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa	15 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	8 Kegiatan	54%
				Jumlah Rancangan Pergub yang disusun	1 Rancangan Pergub	1 Rancangan Pergub	1 Rancangan Pergub	Rancangan Pergub		2 Rancangan Pergub	50%
1	11 59	006.	Bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi kebijakan pengadaan secara elektronik	Terlaksananya bimbingan teknis e-Purchasing, e-Penunjukan Langsung dan e-Pengadaan Langsung	8855 orang	675 orang	1025 orang	193 orang	25%	868 orang	13,83%
				30 Bimtek/Pendampingan	11 Bimtek/Pendampingan	8 Bimtek/Pendampingan	2 Bimtek/Pendampingan		13 Bimtek/Pendampingan	45%	
1	11 62		Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang dan jasa dengan RUP	93%		85%	82,07%	97%		
1	11 62.	001.	Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang diumumkan	68.200 Paket	31,834 Paket	10.000 Paket	8,783 Paket	88%	40,617 paket	60%
1	11 62.	002.	Penyelenggaraan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan	12.462 Paket	8,339 Paket	2,100 Paket	3,582 Paket	95%	11,921 Paket	95%
1	11 62.	004.	Peningkatan layanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	Persentase pelayanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	90%	80%	80%	84,85%	106%	83,28%	92,53%
1	11 62.	003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	28 Laporan	7 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	91,30%	10 Laporan	60,71%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah					100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01 01 1.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa			12 Bulan	12 Bulan	61,46%	12 Bulan		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP						95%		
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kesesuaian Pelaksanaan Lelang/Tender pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP					87,32%	95%		
01 07 1.01 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pola kemitraan Pemerintah dengan Pelaku Usaha Jumlah Rancangan Pergub yang disusun Jumlah Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang diumumkan Jumlah sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa			1 Pola Kemitraan	1 Pola Kemitraan	80,41%	1 Pola Kemitraan 1 Ran Pergub		
					22000 Paket	18525 Paket		22.000 Paket		
					2 Kegiatan	2 Kegiatan		5 Kegiatan		
01 07 1.01 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan			1400 Paket	1220 Paket		87,02%	2200 Paket	
01 07 1.02 03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			3 Laporan	3 Laporan	99,75%	3 Laporan		
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pelaksanaan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik					68,28%	90%		
01 07 1.02 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Aceh			23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	77,12%	23 LPSE/UKPBJ		
01 07 1.02 02	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan elektronik			1 Aplikasi	1 Aplikasi	9,45%	1 Aplikasi		
01 07 1.02 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik			300 Penyedia 23 Kab/Kota (92 orang)	23 Kab/Kota (69 orang)	88,75%	300 Penyedia 23 Kab/Kota (92 orang)		
					150 Permasalahan	300 Permasalahan		150 Permasalahan		
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa						49,45%	90%	
01 07 1.03 01	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh pengelola pengadaan barang dan jasa						1 Kompetensi		
01 07 1.03 02	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaksanaan training/sosialisasi aplikasi sistem pendukung pengadaan						24 UKPBJ		
01 07 1.03 03	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh Jumlah penyelesaian pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada fungsional PEJ Jumlah peserta Bimtek Pengguna SPSE e-Purchasing, e-Tender, e-Penunjukan Langsung, e-Pengadaan Langsung, SIRUP dan Sistem Pendukung Pengadaan			4 Kasus 30 Pengaduan/Sanggah 3 Angkatan	8 Kasus 30 Pengaduan/Sanggah 1 Angkatan	49,45%	10 Kasus 30 Pengaduan/Sanggah		
	Biro Organisasi									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Peningkatan pelayanan administrasi perkatoran	Persentase tersedianya bahan habis pakai		90%	95%	95%	100%	95%	90%	95%
		Persentase Pemenuhan Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan		90%	100%	100%	100%	95%	90%	90%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase organisasi Perangkat Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur	85%	85%	85%		100%	88%	85%	100%
		Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	65,00	63,78	63,00	Masih dalam proses penilaian	-	63,00	65,00	#VALUE!
		Perolehan indeks Reformasi Birokrasi	65,11	61,47	63,04	Masih dalam proses penilaian	-	64,12	63,11	#VALUE!
	Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah Kab/kota	Persentase Kab/kota yang difasilitasi / asistansi Penyusunan OPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	80%	90%	90%	100%	80%	80%	80%
	Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh	Persentase Perangkat Aceh yang difasilitasi/asistansi OPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
	Pembinaan dan Sikronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kab/kota	Jumlah SKPA yang difasilitasi/evaluasi penyusunan analisa Jabatan	47 SKPA/Unit Kerja	20 SKPA/Unit Kerja	30 SKPA/Unit Kerja	30 SKPA/Unit Kerja	100%	30 SKPA/Unit Kerja	20 SKPA/Unit Kerja	42%
		Jumlah Pemeritah Kab/kota yang dibina penyusunan analisis Jabatan/analisis beban kerja	23 Kab/Kota	12 kab/kota	8 Kab/Kota	8 kab/kota	100%	12 Kab/Kota	14 Kab/kota	60%
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah SKPA yang difasilitasi penyusunan Standar Pelayanan	47 SKPA	10 SKPA	8 SKPA	8 SKPA	100%	8 SKPA	10 SKPA	21%
		Jumlah pelaksanaan Bimtek Standar Pelayanan (SP)	2 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	50%
	Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan	Jumlah SKPA yang difasilitasi/asistansi penyusunan SOP	50 SKPA	10 SKPA	15 SKPA	15 SKPA	100%	15 SKPA	15 SKPA	20%
		Jumlah Kab/kota yang dibina Pengelolaan Ketatalaksanaan	23 Kab/kota	10 Kab/kota	4 Kab/Kota	4 Kab/kota	100%	23 Kab/kota	9 Kab/kota	20%
	Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (RAKORPANDA)	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pendayaagunaan Apartur Negara	500 Peserta	101 Peserta	101 Peserta	101 Peserta	100%	101 Peserta	100 Peserta	20%
	Pengelolaaan Perpustakaan Satuan Kerja	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Setda Aceh	1050 orang	800 orang	450 orang	450 orang	100%	850 orang	900 orang	85%
		Tersusun dan tersedianya katalog perpustakaan	5 Katalog	1 Katalog	1 Katalog	1 Katalog	100%	4 Katalog	4 Katalog	80%
		Jumlah pengadaan buku Koleksi perpustakaan	400	400	400	400	100%	400	690	700
	Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja	55 SKPA/	55 SKPA/	55 SKPA/	55 SKPA/	100%	55 SKPA/	55 SKPA/	100%
			Biro	Biro	Biro	Biro		Biro	Biro	
		Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja berjenjang	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	100%	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	100%
	Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (Lkj)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi Road Map Reformasi Birokrasi	23 Kab/kota	15 Kab/kota	5 Kab/Kota	5 Kab/kota	100%	5 Kab/kota	-	100%
	PROGRAM PEMBINAAN , PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR	Persentase ASN setda yang memiliki sertifikasi diklat teknis								
	Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier dan Kediklatan	Jumlah ASN Setda yang difasilitasi mengikuti diklat Teknis dan Fungsional	12 ASN	14 ASN	11 ASN	11 ASN	100%	10 ASN	-	100%
		Jumlah ASN Setda yang mendapat Cuti	1000 ASN	200 ASN	105 ASN	105 ASN	100%	200 ASN	200 ASN	100%
		Jumlah ASN Setda yang menerapkan SKP	637 ASN	637 ASN	598 ASN	598 ASN	100%	611 ASN	637 ASN	100%
		Jumlah ASN Setda yang di tetapkan kenaikan Gaji berkala	300 ASN	300 ASN	300 ASN	300 ASN		300 ASN	300 ASN	100%
		Jumlah ASN Setda yang difasilitasi kenaikan pangkat	160 ASN	160 ASN	106 ASN	106 ASN	100%	160 ASN	160 ASN	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Jumlah ASN lingkup Setda yang diusulkan Satyalancana Karya	10 ASN	10 ASN	10 ASN	10 ASN	100%	10 ASN	10 ASN	100%	
		Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian	Persentase Penataan Arsip Kepegawaian lingkup Setda	95%	90%	90%	90%	100%	95%	100%	
		Biro Umum									
		Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya Kesejahteraan ASN	682	682	682	682	100%	0	0	0%
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Persentase pelayanan oleh aparatur kepada publik	3	3	3	3	100%	0	0	0%
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah ASN dan Tamu	140.000	28.000	28.000	28.000	100%	0	0	0%
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terbayarnya honorarium ASN dan lancarnya pelayanan oleh aparatur kepada publik	11	11	11	20	100%	0	0	0%
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana rumah dinas jabatan	1	1	1	1	100%	0	0	0%
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor	1	1	1	1	100%	0	0	0%
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tingkat kelayakan peralatan gedung kantor	1	1	1	1	100%	0	0	0%
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu								
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	0	0	0	0	0%	3	3	100%
		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh dan KDH/WKDH	0	0	0	0	0%	682	682	100%
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya tambahan penghasilan lainnya	0	0	0	0	0%	8	8	100%
		Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan, terverifikasinya bahan keuangan dan terbayarkannya bantuan sosial kepada masyarakat	0	0	0	0	0%	26	26	100%
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0	0%	8	8	100%
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0	0%	3	3	100%
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0	0%	8	8	100%
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0	0%	7	7	100%
		Biro Administrasi Pimpinan									
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	10 Dok	10 Dok	100%
		1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian Setda Provinsi	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	03	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	5 Dok	5 Dok	100%	
	09	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	8 Org	8 Org	100%	
	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	02	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100%
	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	
	04	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Umum Biro	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100,00	18 Dok	18 Dok	100%
	1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Kebutuhan Materi dan Komunikasi Pimpinan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	01	- Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Materi Pimpinan Tersedia dengan Baik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Kehumasan bagi Pimpinan Pemerintah Aceh	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	03	- Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terkelolanya Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Pimpinan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	01	- Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan bagi Pimpinan Pemerintah Aceh	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlayannya Tamu Pemerintah Aceh dengan Baik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	03	- Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Hubungan Keprotokolan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Banda Aceh, Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH ACEH


BUSTAMI, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670722 199603 1 002

TABEL 2.1 (TC-29)
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DAERAH ACEH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA SEKRETARIAT DAERAH ACEH S.D TAHUN 2023
PROVINSI ACEH

Nama SKPD : Sekretariat Daerah Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN									
4 01	SEKRETARIAT DAERAH									
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah									
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi pengembangan SDM Biro Tapem	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Fasilitasi Bimtek/Pelatihan Bagi ASN Biro Pemotda	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Perkantoran	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	100%	2 Sub Kegiatan	2 Sub Kegiatan	25%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Fasilitasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	100%	1 Tahun	1 Tahun	25%
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Status LPPA	2,9500/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	95%	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	25%
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rasio penyelesaian pemasangan PBU terhadap jumlah kebutuhan PBU pasca Permendagri Batas Daerah	9,195	2,3	2,3	2,3	25%	2,3	2,3	25%
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi kebijakan pemerintah	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	25%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen fasilitasi penataan wilayah	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	4 Dokumen	25%
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai/Status LPPA	2,9500/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	95%	2,8000/tinggi	2,8000/tinggi	25%
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen pengembangan otonomi dan penataan urusan	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	100%	5 Dokumen 3 Dokumen	5 Dokumen 3 Dokumen	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	80%	20%	20%	20%	100%	20%	20%	25%
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar pemerintah	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	25%
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dengan badan usaha/swasta	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	2 Dokumen	25%
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kerjasama daerah	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	3 Laporan	25%
4 01	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat									
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH									
4 01 01	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran	Tersedianya administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi Antar SKPA	Tersedianya Koordinasi Antar SKPA		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01 01	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset dan dan sarana perkantoran	Terpeliharanya aset dan dan sarana perkantoran		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
4 01	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT									
4 01	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	-Insentif Penceramah Kab/kota dalam rangka Safari Ramadhan Pemerintah Aceh (23 Kab/Kota) -Terfasilitasinya keberangkatan PHD (36 orang) -Terlaksananya Bimtek Pembekalan / Pembinaan Petugas Haji Aceh	- Meningkatkan jumlah Petugas Haji Daerah yang memahami tugas pokok sebagai TPHD - Adanya rekomendasi terkait dengan standarisasi penyelenggaraan bimbingan manasik Haji		(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	20%	(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	(1) 1 Dokumen (2) 1 Rekomendasi	80,00%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4 01	Fasilitasi Kelembagaan Bima Spritual	-Terselenggaranya Peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur/Wakil Gubernur Aceh (12 Bulan) -Peusijek Calon Jam'ah Haji Setda Aceh (15 orang)	Terselenggaranya Peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur Aceh dan Mushalla Meuligoe Wakil Gubernur Aceh	3 Mushalla	3 Mushalla	3 Mushalla	100%	3 Mushalla	9	80,00%
4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	- Rakor dan Sinkronisasi Kesra Non Pelayanan Dasar Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	4 Rekomendasi, 4 Kegiatan,	-	-	-	-	4 Rekomendasi, 4 Kegiatan,	2 Rekomendasi, 2 Kegiatan,	50,00%
4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- Raker Pengurus DWP - Seminar Bidang Pendidikan, Ekonomi, Sosial Budaya - Peningkatan Kapasitas DWP Aceh - Peringatan HUT DWP Aceh - Kajian Rutin DWP Aceh	5 kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan	100%	5 Rekomendasi, 5 Kegiatan,	2 Rekomendasi, 2 Kegiatan,	50,00%	
4 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	- Lokakarya-Fokus Grup Diskusi Bidang Komunikasi dan Informasi	1 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	1 Kegiatan	80,00%	
4 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	-Rakor Kesra kab/kota - Raker Bidang Kesra - Hut DW,Raker DW,Kajian Rutin DWP dan Seminar DW	111 Kegiatan	0 Kegiatan	0 Kegiatan	-	0 Kegiatan	1 Kegiatan	90,00%	
4 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	-Terfasilitasinya Donor Darah SKPA - Rakor UKS dan Raker Kesehatan	2 Kegiatan, 1 Laporan	2 Kegiatan, 1 Laporan	2 Kegiatan, 1 Laporan	85%	2 Kegiatan, 1 Laporan	2 Kegiatan, 1 Laporan	85,00%	
4 01	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	-Rakor Pendidikan dan Raker	- 1 Rekomendasi terkait pembinaan lembaga pendidikan - 5 kali Terlaksananya kegiatan Organisasi Mahasiswa	- 1. Rekomendasi - 1. Laporan Kegiatan	- 1. Rekomendasi - 1. Laporan Kegiatan	85%	- 1 Rekomendasi - 1 Laporan Kegiatan	- 3. Rekomendasi - 3. Laporan Kegiatan	60,00%	
Biro Hukum										
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	90%	Rp.1.402.043.997	#####	#####	93,15%	Rp -	Rp.2.804.087.994	Rp.3.115.653.327
4 01 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu, laporan keuangan dan laporan realisasi	90%	Rp.54.930.350	Rp.55.700.050	Rp.54.930.350	98,6%		Rp.109.860.700	Rp.122.067.444
4 01 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	90%	Rp.815.460.671	Rp.818.285.678	Rp.815.460.671	99,65%		Rp.1.630.921.342	Rp.1.812.134.824
4 01 01 1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya Kompetensi ASN Biro Hukum sertaTerpahamanya produk hukum oleh aparaturn dan masyarakat	90%	Rp.221.789.359	Rp.268.676.300	Rp.221.789.359	82,55%		Rp.443.578.718	Rp.492.865.242
4 01 01 1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	90%	Rp.110.601.688	Rp.132.516.787	Rp.110.601.688	83,46%		Rp.221.203.376	Rp.245.781.529

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan			
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)		
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)		
5	01 01 1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	90%	Rp.159.703.929	Rp.190.403.220	Rp.159.703.929	83,88%		Rp.319.407.858	Rp.354.897.620	
7	01 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Kendaraan Dinas	90%	Rp.39.558.000	Rp.39.600.000	Rp.39.558.000	99,89%		Rp.79.116.000	Rp.87.906.667	
4	01 05	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Persentase produk Hukum Kewenangan Aceh yang di fasilitasi, yang diselesaikan; Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasi/evaluasi yang dapat diselesaikan; dan Persentase dokumentasi hukum.	90%	Rp.7.817.381.372	#####	#####	98,30%	Rp	-	Rp.15.634.762.744	#####
4	01 05 1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Terbentuknya Qanun Aceh, Pergub, Kepgub, serta produk dan dokumen hukum lainnya, terciptanya keselarasan produk hukum di daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi, serta Ketersediaan informasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif	90%	Rp.3.667.189.496	Rp.3.738.374.456	Rp.3.667.189.496	98,10%		Rp.7.334.378.992	Rp.8.149.309.991	
4	01 05 1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Terlaksananya Perlindungan hukum bagi aparaturnya Pemerintah Aceh, perlindungan hukum bagi fakir miskin serta tersedianya laporan aksi HAM	90%	Rp.4.150.191.876	Rp.4.213.920.872	Rp.4.150.191.876	98,49%		Rp.8.300.383.752	Rp.9.222.648.613	
Biro Perekonomian												
4.	01 06	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian Inflasi Daerah	17,00	16,00	17,00	116,00	682,35	2,15	134,15	789,12	
4.	01 06 1.01.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Tersedianya Kebijakan Perekonomian yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	16,00	15,00	16,00	16,00	100,00	85,00	116,00	725,00	
4.	01 06 1.01.01.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4	4,00	4	4,00	100,00	4	12,00	300,00	
4.	01 06 1.01.02.	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12	11,00	12	12,00	100,00	12	35,00	291,67	
4.	01 06 1.02.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tersedianya Kebijakan Sumber Daya Alam yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	19,00	18,00	19,00	19,00	100,00	85,00	122,00	642,11	
4.	01 06 1.02.01.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	14	13,00	14	14,00	100,00	14	41,00	292,86	
4.	01 06 1.02.02.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	2,00	2	2,00	100,00	2	6,00	300,00	
4.	01 06 1.02.03.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3	3,00	3	3,00	100,00	3	9,00	300,00	
4.	01 06 1.03.	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Tersedianya Kebijakan Pengembangan BUMD dan BLUD yang Sinergi	3,00	5,00	3,00	3,00	100,00	85,00	93,00	3100,00	
4.	01 06 1.03.01.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	3,00	1,00	1,00	100,00	1	5,00	500,00	
4.	01 06 1.03.02.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	1,00	1,00	1,00	100,00	1	3,00	300,00	
4.	01 06 1.03.04.	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	1,00	1	1,00	100,00	1	3,00	300,00	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa												

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1	11 58	Program Peningkatan Mutu SDM, Pengembangan Kerjasama dan Advokasi Hukum Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kasus hukum pengadaan barang dan jasa yang diselesaikan	95%		85%	70,01%	70,01%			
1	11 58	001.	Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	12 Kasus	6 Kasus	1 Kasus	11 Kasus	100,00%	17 Kasus	92%	
			Jumlah penyelesaian pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	90 Pengaduan/Sanggah		20 Pengaduan/Sanggah	70 Pengaduan/Sanggah		195 Pengaduan/Sanggah	95%	
1	11 58.	003.	Penyusunan dan Perumusan Pola Kemitraan Pemerintah Dengan Dunia Usaha	4 Pola Kemitraan	1Pola Kemitraan	2 Pola Kemitraan	0%	0,00%	1 Pola Kemitraan	25%	
1	11 58.	004.	Pembinaan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Pengadaan Barang/Jasa	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh pengelola pengadaan barang dan jasa	12 Kompetensi	7 Kompetensi	4 Kompetensi	2 Kompetensi	50%	9 Kompetensi	60%
				679 orang	242 orang	38 orang	5 orang		247 Orang		
1	11 58.	005.	Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Jumlah aparatur pengadaan yang bersertifikat pengadaan barang dan jasa	12 Angkatan	1 Akt	4 Angkatan	0	0%	1 Angkatan	11%
				420 orang	47 orang	120 orang	0		47 orang		
1	11 59		Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan Sistem Elektronik	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP	80%		90%	76,87%	76,87%		
1	11 59	001.	Penyelenggaraan layanan pengguna sistem pengadaan secara elektronik	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi	1200 Penyedia	739 Penyedia	300 Penyedia	214 Penyedia	71%	953 Penyedia	80%
				Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi	Kab/Kota (276 ora	23 Kab/Kota (95 orang)	23 Kab/Kota (92 orang)	23 Kab/Kota	25%	23 Kab/Kota (95 orang)	35%
				Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik	450 Permasalahan	90 Permasalahan	150 Permasalahan	85 Permasalahan	57%	175 Permasalahan	38%
1	11 59	002.	Pembinaan dan pengelolaan sistem elektronik pengadaan barang/jasa	Jumlah pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Aceh	23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	20%	23 LPSE/UKPBJ	20%
				414 orang	74 orang	115 orang	0		74 orang		
1	11 59	004.	Pengelolaan dan pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan secara elektronik	4 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	1 Aplikasi	95%	3 Aplikasi	75%
1	11 59	005.	Pengembangan kebijakan dan sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa	Jumlah sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa	15 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	3 Kegiatan	75%	8 Kegiatan	54%
				Jumlah Rancangan Pergub yang disusun	1 Rancangan Pergub	1 Rancangan Pergub	1 Rancangan Pergub	Rancangan Pergub		2 Rancangan Pergub	50%
1	11 59	006.	Bimbingan teknis, pelatihan dan sosialisasi kebijakan pengadaan secara elektronik	Terlaksananya bimbingan teknis e-Purchasing, e-Penunjukan Langsung dan e-Pengadaan Langsung	8855 orang	675 orang	1025 orang	193 orang	25%	868 orang	13,83%
				30 Bimtek/Pendampingan	11 Bimtek/Pendampingan	8 Bimtek/Pendampingan	2 Bimtek/Pendampingan		13 Bimtek/Pendampingan	45%	
1	11 62		Program Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persentase kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang dan jasa dengan RUP	93%		85%	82,07%	97%		
1	11 62.	001.	Perencanaan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah	Jumlah Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang diumumkan	68.200 Paket	31,834 Paket	10.000 Paket	8,783 Paket	88%	40,617 paket	60%
1	11 62.	002.	Penyelenggaraan pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan	12.462 Paket	8,339 Paket	2,100 Paket	3,582 Paket	95%	11,921 Paket	95%
1	11 62.	004.	Peningkatan layanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	Persentase pelayanan administrasi dan sarana pengadaan barang dan jasa	90%	80%	80%	84,85%	106%	83,28%	92,53%
1	11 62.	003.	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	28 Laporan	7 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	91,30%	10 Laporan	60,71%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah					100%		

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
01 01 1.02 01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa			12 Bulan	12 Bulan	61,46%	12 Bulan		
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	Persentase pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP						95%		
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase kesesuaian Pelaksanaan Lelang/Tender pengadaan barang dan jasa sesuai dengan RUP					87,32%	95%		
01 07 1.01 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pola kemitraan Pemerintah dengan Pelaku Usaha Jumlah Rancangan Pergub yang disusun Jumlah Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang diumumkan Jumlah sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa			1 Pola Kemitraan	1 Pola Kemitraan	80,41%	1 Pola Kemitraan 1 Ran Pergub		
					22000 Paket	18525 Paket		22.000 Paket		
					2 Kegiatan	2 Kegiatan		5 Kegiatan		
01 07 1.01 02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan			1400 Paket	1220 Paket		87,02%	2200 Paket	
01 07 1.02 03	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa			3 Laporan	3 Laporan	99,75%	3 Laporan		
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Persentase pelaksanaan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik					68,28%	90%		
01 07 1.02 01	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah pembinaan dan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Aceh			23 LPSE/UKPBJ	23 LPSE/UKPBJ	77,12%	23 LPSE/UKPBJ		
01 07 1.02 02	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan elektronik			1 Aplikasi	1 Aplikasi	9,45%	1 Aplikasi		
01 07 1.02 03	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna Layanan Pengadaan Secara Elektronik			300 Penyedia 23 Kab/Kota (92 orang)	23 Kab/Kota (69 orang)	88,75%	300 Penyedia 23 Kab/Kota (92 orang)		
					150 Permasalahan	300 Permasalahan		150 Permasalahan		
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa						49,45%	90%	
01 07 1.03 01	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh pengelola pengadaan barang dan jasa						1 Kompetensi		
01 07 1.03 02	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah pelaksanaan training/sosialisasi aplikasi sistem pendukung pengadaan						24 UKPBJ		
01 07 1.03 03	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh Jumlah penyelesaian pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh Terlaksananya kegiatan pembinaan kepada fungsional PEJ Jumlah peserta Bimtek Pengguna SPSE e-Purchasing, e-Tender, e-Penunjukan Langsung, e-Pengadaan Langsung, SIRUP dan Sistem Pendukung Pengadaan			4 Kasus 30 Pengaduan/Sanggah 3 Angkatan	8 Kasus 30 Pengaduan/Sanggah 1 Angkatan	49,45%	10 Kasus 30 Pengaduan/Sanggah		
	Biro Organisasi									
	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Persentase kelancaran pelayanan administrasi perkantoran		95%	95%	95%	100%	95%	95%	95%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan	
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
	Peningkatan pelayanan administrasi perkatoran	Persentase tersedianya bahan habis pakai		90%	95%	95%	100%	95%	90%	95%
		Persentase Pemenuhan Honorarium Penanggung Jawab Kegiatan		90%	100%	100%	100%	95%	90%	90%
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Persentase organisasi Perangkat Aceh yang tepat fungsi dan tepat ukur	85%	85%	85%		100%	88%	85%	100%
		Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh	65,00	63,78	63,00	Masih dalam proses penilaian	-	63,00	65,00	#VALUE!
		Perolehan indeks Reformasi Birokrasi	65,11	61,47	63,04	Masih dalam proses penilaian	-	64,12	63,11	#VALUE!
	Pembinaan Penataan Kelembagaan Perangkat daerah Kab/kota	Persentase Kab/kota yang difasilitasi / asistansi Penyusunan OPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	80%	90%	90%	100%	80%	80%	80%
	Penataan Kelembagaan Satuan Kerja Perangkat Aceh	Persentase Perangkat Aceh yang difasilitasi/asistansi OPD sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	100%	80%	80%	80%	100%	80%	80%	100%
	Pembinaan dan Sikronisasi analisa jabatan SKPA dan Perangkat Daerah Kab/kota	Jumlah SKPA yang difasilitasi/evaluasi penyusunan analisa Jabatan	47 SKPA/Unit Kerja	20 SKPA/Unit Kerja	30 SKPA/Unit Kerja	30 SKPA/Unit Kerja	100%	30 SKPA/Unit Kerja	20 SKPA/Unit Kerja	42%
		Jumlah Pemeritah Kab/kota yang dibina penyusunan analisis Jabatan/analisis beban kerja	23 Kab/Kota	12 kab/kota	8 Kab/Kota	8 kab/kota	100%	12 Kab/Kota	14 Kab/kota	60%
	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Jumlah SKPA yang difasilitasi penyusunan Standar Pelayanan	47 SKPA	10 SKPA	8 SKPA	8 SKPA	100%	8 SKPA	10 SKPA	21%
		Jumlah pelaksanaan Bimtek Standar Pelayanan (SP)	2 kali	-	1 kali	1 kali	100%	1 kali	1 kali	50%
	Peningkatan kapasitas pengelolaan ketatalaksanaan	Jumlah SKPA yang difasilitasi/asistansi penyusunan SOP	50 SKPA	10 SKPA	15 SKPA	15 SKPA	100%	15 SKPA	15 SKPA	20%
		Jumlah Kab/kota yang dibina Pengelolaan Ketatalaksanaan	23 Kab/kota	10 Kab/kota	4 Kab/Kota	4 Kab/kota	100%	23 Kab/kota	9 Kab/kota	20%
	Rapat Koordinasi Pendayagunaan Aparatur Negara (RAKORPANDA)	Jumlah Peserta yang mengikuti Rapat Koordinasi Pendayaagunaan Apartur Negara	500 Peserta	101 Peserta	101 Peserta	101 Peserta	100%	101 Peserta	100 Peserta	20%
	Pengelolaaan Perpustakaan Satuan Kerja	Jumlah Pengunjung Perpustakaan Setda Aceh	1050 orang	800 orang	450 orang	450 orang	100%	850 orang	900 orang	85%
		Tersusun dan tersedianya katalog perpustakaan	5 Katalog	1 Katalog	1 Katalog	1 Katalog	100%	4 Katalog	4 Katalog	80%
		Jumlah pengadaan buku Koleksi perpustakaan	400	400	400	400	100%	400	690	700
	Pengembangan Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Kegiatan Perangkat Daerah	Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti Fasilitasi Penyusunan Perjanjian Kinerja	55 SKPA/	55 SKPA/	55 SKPA/	55 SKPA/	100%	55 SKPA/	55 SKPA/	100%
			Biro	Biro	Biro	Biro		Biro	Biro	
		Jumlah SKPA/Biro yang mengikuti fasilitasi penyusunan Perjanjian Kinerja berjenjang	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	100%	55 SKPA/Biro	55 SKPA/Biro	100%
	Penyusunan dan Penyiapan Dokumen LAKIP	Jumlah dokumen Laporan Kinerja (Lkj)	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kab/kota	Jumlah Kab/kota yang difasilitasi Road Map Reformasi Birokrasi	23 Kab/kota	15 Kab/kota	5 Kab/Kota	5 Kab/kota	100%	5 Kab/kota	-	100%
	PROGRAM PEMBINAAN , PENGEMBANGAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR	Persentase ASN setda yang memiliki sertifikasi diklat teknis								
	Pembinaan dan Pengembangan Pola Karier dan Kediklatan	Jumlah ASN Setda yang difasilitasi mengikuti diklat Teknis dan Fungsional	12 ASN	14 ASN	11 ASN	11 ASN	100%	10 ASN	-	100%
		Jumlah ASN Setda yang mendapat Cuti	1000 ASN	200 ASN	105 ASN	105 ASN	100%	200 ASN	200 ASN	100%
		Jumlah ASN Setda yang menerapkan SKP	637 ASN	637 ASN	598 ASN	598 ASN	100%	611 ASN	637 ASN	100%
		Jumlah ASN Setda yang di tetapkan kenaikan Gaji berkala	300 ASN	300 ASN	300 ASN	300 ASN		300 ASN	300 ASN	100%
		Jumlah ASN Setda yang difasilitasi kenaikan pangkat	160 ASN	160 ASN	106 ASN	106 ASN	100%	160 ASN	160 ASN	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
		Jumlah ASN lingkup Setda yang diusulkan Satyalancana Karya	10 ASN	10 ASN	10 ASN	10 ASN	100%	10 ASN	10 ASN	100%	
		Peningkatan Pengelolaan Arsip dan Informasi Kepegawaian	95%	90%	90%	90%	100%	95%	95%	100%	
		Biro Umum									
		Belanja Tidak Langsung Gaji dan Tunjangan ASN	682	682	682	682	100%	0	0	0%	
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Meningkatnya layanan administrasi perkantoran								
		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	3	3	3	100%	0	0	0%	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	140.000	28.000	28.000	28.000	100%	0	0	0%	
		Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran	11	11	11	20	100%	0	0	0%	
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana rumah dinas jabatan	1	1	1	100%	0	0	0%	
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tingkat kelengkapan sarana dan prasarana gedung kantor	1	1	1	100%	0	0	0%	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Tingkat kelayakan peralatan gedung kantor	1	1	1	100%	0	0	0%	
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu								
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah								
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran	0	0	0	0%	3	3	100%	
		Program Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh dan KDH/WKDH	0	0	0	0%	682	682	100%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya tambahan penghasilan lainnya	0	0	0	0%	8	8	100%	
		Pelaksanaan Penatusahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Tersusunnya laporan keuangan, terverifikasinya bahan keuangan dan terbayarkannya bantuan sosial kepada masyarakat	0	0	0	0%	26	26	100%	
		Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0%	8	8	100%	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0%	3	3	100%	
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0%	8	8	100%	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur pemerintah kepada publik	0	0	0	0%	7	7	100%	
		Biro Administrasi Pimpinan									
4	01	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	-	-	-	-	10 Dokumen	10 Dokumen	100%
		01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	10 Dok	10 Dok	100%
		1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian Setda Provinsi	-	-	-	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD Tahun 2023-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target program dan Kegiatan (Renja SKPD Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian target Renstra SKPD s/d tahun berjalan		
					Target Renja SKPD Tahun 2022	Realisasi Renja SKPD Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)	
1		3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
	03	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-	-	-	-	5 Dok	5 Dok	100%	
	09	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-	-	8 Org	8 Org	100%	
	1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	
	02	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	100,00	2 Dok	2 Dok	100%
	1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	18 Dokumen	100%	
	04	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Umum Biro	18 Dok	18 Dok	18 Dok	18 Dok	100,00	18 Dok	18 Dok	100%
	1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Kebutuhan Materi dan Komunikasi Pimpinan	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen	100%
	01	- Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Materi Pimpinan Tersedia dengan Baik	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Pelayanan Kehumasan bagi Pimpinan Pemerintah Aceh	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	03	- Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Terkelolanya Dokumentasi Kegiatan Pimpinan	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100%
	1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Pimpinan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%
	01	- Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Terlaksananya Pelayanan Keprotokolan bagi Pimpinan Pemerintah Aceh	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00	2 Dokumen	2 Dokumen	100%
	02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Terlayannya Tamu Pemerintah Aceh dengan Baik	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
	03	- Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Terlaksananya Hubungan Keprotokolan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Banda Aceh, Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH ACEH


BUSTAMI, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670722 199603 1 002

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17	-Fasilitasi Rancangan pergub Aceh tentang kurikulum Pendidikan Aceh -Terselenggaranya FGD Pemetaan dan pengembangan Pemuda Kreatif -Terselenggaranya Rakor Pegembangan Pemuda Kreatif	100%	ada/tidak	Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
18	- Terselenggaranya rakor kelembagaan keistimewaan aceh - Terselenggaranya kegiatan organisasi kemahasiswaan - Terselenggaranya Kegiatan Ormas/Yayasan		ada/tidak	Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
19	- Terlaksananya seminar DMDI - Terselenggaranya lomba seni Qasidah Gambus di Aceh - Terlaksananya seminar Jalur rempah - Terlaksananya Kampanye Jalur Rempah - Terlaksananya kegiatan penyusunan regulasi pada biro Keistimewaan dan Kesra		ada/tidak	ada	Tidak	ada	ada	ada	ada	ada	ada	
Biro Hukum												
1	Jumlah rancangan Qanun yang selesai dirumuskan			90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
2	Jumlah rancangan Kepgub /Pergub yang selesai			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
3	Jumlah rancangan Per-UU-an yang dirumuskan			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
4	Jumlah Ranqanun Kab/Kota yang diajukan untuk dikaji			90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
5	Jumlah Ranqanun Kab/Kota yang diklarifikasi			90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
6	Jumlah gugatan yang selesai			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
7	Jumlah penyelesaian sengketa hukum Pem.Aceh yang selesai			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
8	Jumlah MoU dan MoA yang selesai di kaji			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
9	Jumlah naskah hibah yang selesai di kaji			90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
10	Jumlah Qanun dan Pergub yang disajikan pada website JDIH			90%	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	
11	Jumlah produk hukum didistribusikan			90%	90%	95%	95%	97%	95%	95%	95%	
12	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan terhadap aparatur Pem.Prov dan Kab/Kota			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
13	Jumlah produk hukum yang disosialisasikan terhadap Masyarakat			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
14	Jumlah barang/jasa penunjang adm.keuangan dan kegiatan penatausahaan			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
15	Jumlah kebutuhan bahan bacaan			90%	90%	95%	95%	98%	95%	95%	95%	
Biro Perekonomian												
1	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	-	-	4	4	4	4	4	-	4	4	
2	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	-	-	12	10	10	10	10	-	10	10	
3	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	-	-	14	14	14	14	14	-	14	14	
4	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	-	-	2	2	2	2	2	-	2	2	
5	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	-	-	3	3	3	3	3	-	3	3	
6	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	-	-	1	1	1	2	2	-	1	1	
8	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	-	-	1	1	2	2	2	-	1	2	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa												
1	Persentase pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel	-	-	85%	90%	95%	87%	90%				
2	Persentase penyelesaian permasalahan hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang dan jasa pemerintah	-	-	85%	90%	95%	90%	98%				
3	Persentase pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder	-	-	85%	90%	95%	90%	95%				
4	Persentase aparatur dan penyedia yang telah memenuhi kompetensi pengadaan barang dan jasa	-	-	85%	90%	95%	85%	95%				
5	Persentase pengelolaan infrastruktur dan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	-	-	90%	95%	98%	90%	99%				
6	Persentase pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	-	-	90%	95%	98%	95%	98%				
Biro Administrasi Pembangunan												
1	Program Pembinaan, Pengendalian dan Pelaksanaan pembangunan			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
2	Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur			80%	80%	90%	90%	60%	70%	90%	90%	
3	Kegiatan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang jasa konstruksi			1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	
4	Kegiatan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan provinsi			80%	80%	80%	90%	80%	70%	80%	90%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
5	Kegiatan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan bidang administrasi pembangunan kab/kota			80%	80%	80%	90%	80%	70%	80%	90%	
6	Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan			90%	80%	90%	90%	90%	80%	90%	90%	
7	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran			90%	80%	90%	90%	90%	80%	90%	0,9	
8	Kegiatan pembinaan kawasan permukiman dan pemanfaatan ruang daerah			-	80%	80%	90%	80%	15%	90%	90%	
9	Kegiatan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan Otsus aceh			-	80%	80%	90%	80%	70%	80%	90%	
10	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			-	-	90%	90%	90%	-	90%	90%	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Baru Sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/2020
11	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah			-	-	-	-	-	-	80%	80%	
12	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD			-	-	-	-	-	-	100%	100%	
13	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan			-	-	90%	90%	-	-	90%	90%	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Baru Sesuai Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050/2020
14	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN			-	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
15	Sub Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah			-	-	-	-	-	-	1 Laporan, 80%	1 Laporan, 80%	
16	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			-	-	-	-	-	-	80%	80%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
17	Sub Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah			-	-	-	-	-	-	100%	100%	
18	Sub Kegiatan Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah			-	-	-	-	-	-	1 Laporan	1 Laporan	
Biro Organisasi												
1	Perolehan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Aceh			65	66	67,5	71,00	63,21	64,17	65	66,00	
2	Perolehan indeks pelayanan puublik			3,65	3,70	3,90	4,50	3,59	4,01	3,65	3,70	
3	Perolehan indeks Reformasi Birokrasi			65	66	67	68	63	64	65	66	
Biro Umum												
1	Terbayarkannya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh dan KDH/WKDH			682 ASN	682 ASN	682 ASN/ KDH/WKD H	682 ASN/ KDH/WKD H	682 ASN	-	682 ASN/ KDH/ WKDH	682 ASN/ KDH/ WKDH	
2	Tersediannya laporan Renstra, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran			-	-	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	
3	Meningkatnya pelayanan oleh aparatur kepada publik			3 Rekening, 34 Kegiatan	3 Rekening, 34 Kegiatan	3 Rekening, 34 Kegiatan	3 Rekening, 34 Kegiatan	3 Rekening, 34 Kegiatan	-	3 Rekening, 34 Kegiatan	3 Rekening, 34 Kegiatan	
4	Tersusunnya laporan keuangan, terverifikasinya bahan keuangan dan terbayarkannya bantuan sosial kepada masyarakat			-	-	26 Laporan	26 Laporan	26 Laporan	-	26 Laporan	26 Laporan	
Biro Administrasi Pimpinan												
1	Tersedianya Alat Penunjang Kedinasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Jumlah Iklan Kegiatan Pemerintah Aceh melalui Media Cetak/ Elektronik			300 Iklan	320 Iklan	350 Iklan	370 Iklan	325 Iklan	358 Iklan	370 Iklan	370 Iklan	
3	Jumlah Press Release tentang Pemerintah Aceh			1000 rilis	1100 rilis	1200 rilis	1300 rilis	1150 rilis	1330 rilis	1300 rilis	1300 rilis	
4	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersertifikasi dalam bidang kehumasan			60 Org	60 Org	60 Org	60 Org	0 Org	0 Org	60 Org	60 Org	
5	Jumlah Liputan Kegiatan/Kunjungan Kerja Pimpinan Pemerintah Daerah			1000 Keg	1100 Keg	1200 Keg	1300 Keg	950 Keg	1124 Keg	1300 Keg	1300 Keg	
6	Persentase Peningkatan Kualitas Hubungan Kelembagaan dengan Humas Kabupaten/Kota, Instansi Vertikal, dan Stakeholder terkait			80%	85%	90%	95%	83%	88%	95%	95%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
7	Jumlah pelaksanaan silaturahmi rutin antara Pemerintah Aceh dengan Media Massa			24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	24 Keg	
8	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersertifikasi dalam bidang keprotokolan			80 Org	80 Org	80 Org	80 Org	0	0	80 Org	80 Org	
9	Terlaksananya Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia			1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	1 Keg	
10	Terlaksananya pelayanan acara pada kegiatan Pemerintah Aceh			900 Keg	900 Keg	900 Keg	900 Keg	920 Keg	931 Keg	900 Keg	900 Keg	
11	Jumlah Fasilitasi terhadap pelayanan acara dan tamu KDH/WKDH			30 Keg	30 Keg	35 Keg	35 Keg	38 Keg	36 Keg	35 Keg	35 Keg	
12	Jumlah Aparatur Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tersertifikasi dalam penyusunan naskah, makalah dan risalah pimpinan			90 Orang	90 Orang	90 Orang	90 Orang	0 Orang	0 Orang	90 Orang	90 Orang	
13	Jumlah pidato/sambutan Pimpinan Pemerintah Daerah yang berkualitas			1000 Naskah	1100 Naskah	1200 Naskah	1300 Naskah	522 Naskah	649 Naskah	1000 Naskah	1000 Naskah	
14	Jumlah makalah Pimpinan Pemerintah Daerah yang berkualitas			7 Makalah	7 Makalah	8 Makalah	10 Makalah	21 Makalah	12 Makalah	12 Makalah	12 Makalah	
15	Jumlah Analisis berita yang dihasilkan			24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	24 Dok	
16	Jumlah Himpunan Berita Pers Terkait Pemerintah Aceh			48 Dok	48 Dok	48 Dok	48 Dok	48 Dok	48 Dok	48 Dok	48 Dok	
17	Jumlah Baliho Kegiatan Pemerintah Aceh yang dicetak			380 Bh	400 bh	450 Bh	470 bh	450 Bh	173 Bh	470 bh	470 bh	
18	Jumlah Spanduk Kegiatan Pemerintah Aceh yang dicetak			280 Bh	350 Bh	420 Bh	450 Bh	365 Bh	368 Bh	450 Bh	450 Bh	
19	Jumlah Leaflet Kegiatan Pemerintah Aceh yang dicetak			1700 Bh	1850 Bh	2000 Bh	2100 Bh	1500 Bh	1500 Bh	2100 Bh	2100 Bh	
20	Jumlah Poster Kegiatan Pemerintah Aceh yang dicetak			150 Bh	170 Bh	200 Bh	220 Bh	180 Bh	220 Bh	220 Bh	220 Bh	
21	Jumlah Aspirasi Masyarakat yang difasilitasi dan disampaikan kepada Pimpinan			25 Dok	25 Dok	25 Dok	30 Dok	19 Dok	19 Dok	36 Dok	36 Dok	
22	Persentase Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Informasi Publik			64%	71%	83%	96%	70%	80%	96%	96%	
23	Persentase Informasi Publik yang diumumkan			65%	85%	90%	95%	71%	85%	95%	95%	

No	Indikator	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Kinerja				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	
				2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
24	Persentase Informasi Publik yang disediakan			65%	80%	92%	97%	80%	85%	97%	97%	
25	Persentase Layanan Informasi Publik			70%	80%	85%	97%	80%	80%	97%	97%	
26	Persentase PPID Pembantu Sekretariat Daerah Aceh yang aktif			23%	35%	47%	70%	47%	45%	70%	70%	
27	Persentase Peningkatan Kualitas perencanaan program kegiatan dan pelaporan Setda Aceh			-	-	-	-	-	-	-	95%	
28	Persentase peningkatan kualitas pelayanan kepegawaian Setda Aceh			-	-	-	-	-	-	-	80%	

Banda Aceh, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH ACEH

Bustami
BUSTAMI, SE, M.Si

Bustami
PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670722 199603 1 002

TABEL TC-31 (2.4)
REVIUW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPA TAHUN 2023
SEKRETARIAT DAERAH ACEH

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN					
	SEKRETARIAT DAERAH				244.533.645.875	SEKRETARIAT DAERAH				237.272.201.144	
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				4.271.884.987					6.299.911.128	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Aceh			1.593.306.787	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Aceh			1.443.910.074	
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aceh	Fasilitasi pengembangan SDM Biro Tapem	2 Sub Kegiatan	48.209.280	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aceh	Fasilitasi pengembangan SDM Biro Tapem	2 Sub Kegiatan	72.340.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aceh	Fasilitasi Bimtek/Pelatihan Bagi ASN Biro Pematda	1 Tahun	48.209.280	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aceh	Fasilitasi Bimtek/Pelatihan Bagi ASN Biro Pematda	1 Tahun	72.340.000	
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	184.899.243	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	154.149.826	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	84.652.276	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	90.006.570	
b	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	100.246.967	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	64.143.256	
3	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	975.428.040	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	2 Sub Kegiatan	788.734.000	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	36.285.480	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	52.494.000	
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	939.142.560	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	1 Tahun	736.240.000	
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Perkantoran	2 Sub Kegiatan	384.770.224	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Perkantoran	2 Sub Kegiatan	428.686.248	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh	Fasilitasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	203.071.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh	Fasilitasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	1 Tahun	199.090.000	
b	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh	Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	181.698.424	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh	Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	1 Tahun	229.596.248	
II	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Aceh	Nilai/Status LPPA	2,8000/tin ggi	2.678.578.200	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Aceh	Nilai/Status LPPA	2,8000/ting gi	4.856.001.054	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Aceh	Rasio penyelesaian pemasangan PBU terhadap jumlah kebutuhan PBU pasca Permendagri Batas Daerah	2,3	931.289.100	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Aceh	Rasio penyelesaian pemasangan PBU terhadap jumlah kebutuhan PBU pasca Permendagri Batas Daerah	2,3	1.618.465.859	
a	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Aceh	Jumlah dokumen administrasi kebijakan pemerintah	3 Dokumen	102.000.000	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Aceh	Jumlah dokumen administrasi kebijakan pemerintah	3 Dokumen	83.334.000	
b	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Aceh	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum	4 Dokumen	102.000.000	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Aceh	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum	4 Dokumen	183.334.000	
c	Fasilitasi Penataan Wilayah	Aceh	Jumlah dokumen fasilitasi penataan wilayah	4 Dokumen	727.289.100	Fasilitasi Penataan Wilayah	Aceh	Jumlah dokumen fasilitasi penataan wilayah	4 Dokumen	1.351.797.859	
2	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Aceh	Nilai/Status LPPA	2,8000/tinggi	727.289.100	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Aceh	Nilai/Status LPPA	2,8000/tinggi	2.299.195.195	
a	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Aceh	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	6 Dokumen	306.000.000	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Aceh	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	6 Dokumen	1.216.502.000	
b	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Aceh	Jumlah dokumen pengembangan otonomi dan penataan urusan	5 Dokumen 3 Dokumen	204.000.000	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Aceh	Jumlah dokumen pengembangan otonomi dan penataan urusan	5 Dokumen 3 Dokumen	710.168.000	
c	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	Aceh	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintah	6 Dokumen	217.289.100	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	Aceh	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintah	6 Dokumen	372.525.195	
3	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Aceh	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	20%	1.020.000.000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Aceh	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	20%	938.340.000	
a	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Aceh	Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar pemerintah	6 Dokumen	510.000.000	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Aceh	Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar pemerintah	6 Dokumen	466.670.000	
b	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Aceh	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dengan badan usaha/swasta	2 Dokumen	204.000.000	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Aceh	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dengan badan usaha/swasta	2 Dokumen	216.668.000	
c	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Aceh	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kerjasama daerah	3 Laporan	306.000.000	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Aceh	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kerjasama daerah	3 Laporan	255.002.000	
Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat					10.777.693.824					12.227.813.335	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.106.257.503					2.464.864.581	
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Banda Aceh	Tersedianya administrasi perkantoran	12 Bulan	920.978.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Tersedianya administrasi perkantoran		1.099.620.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Banda Aceh	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan	12 Bulan	705.760.243	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan		767.098.258	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Banda Aceh	Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran	12 Bulan	36.842.760	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Tersedianya persediaan barang cetakan dan penggandaan administrasi perkantoran		41.733.023	
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Banda Aceh	Tersedianya Koordinasi Antar SKPA	12 Bulan	196.153.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Tersedianya Koordinasi Antar SKPA		322.991.400	
5	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Banda Aceh	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal	12 Bulan	121.445.100	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal		121.445.100	
6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Banda Aceh	Terpeliharanya aset dan sarana perkantoran	12 Bulan	125.078.400	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Terpeliharanya aset dan sarana perkantoran		111.976.800	
II	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				8.671.436.321					9.762.948.754	
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	Banda Aceh	Tingkat Kepuasan Jumah Haji terhadap pelayanan Tim TPHD dan Terlaksananya Seleksi Petugas Haji Daerah Aceh	0,95	4.066.918.718	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	Aceh	Tingkat Kepuasan Jumah Haji terhadap pelayanan Tim TPHD dan Terlaksananya Seleksi Petugas Haji Daerah Aceh		4.705.534.974	
		Terjalinya silaturahmi dan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Nadhir Waqaf	0,85	Terjalinya silaturahmi dan kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan Nadhir Waqaf							
		Terlaksananya pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Aceh ke 23 Kab/Kota	23 Kab/kota	Terlaksananya pelaksanaan Safari Ramadhan Pemerintah Aceh ke 23 Kab/Kota							
2	Fasilitasi Kelembagaan Bima Spritual	Banda Aceh	Terselenggaranya peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur Aceh dan Mushalla Meuligoe Wakil Gubernur Aceh	3 Mushalla 12 bulan	1.782.136.831	Fasilitasi Kelembagaan Bima Spritual	Aceh	Terselenggaranya peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur Aceh dan Mushalla Meuligoe Wakil Gubernur Aceh		1.468.280.411	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Banda Aceh	- Rakor Pengembangan Pemuda Kreatif - Kajian Jalur Rempah - Penyusunan regulasi - FGD pemetaan dan pengembangan Pemuda kreatif	4 Pergub 4 Kegiatan	280.125.731	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Aceh	- Talkshow yang muda yang berkarya - Kajian Jalur Rempah - Penyusunan regulasi - Rakor Implementasi Pergub - Seminar DMDI -Rakor Kebudayaan	5 Kegiatan 2 Pergub	552.878.311	
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Banda Aceh	-Terlaksananya Hut DWP aceh - Raker DWP Aceh - Raker Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP - Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - training/ESQ	5 kegiatan	1.029.228.828	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Aceh	-Terlaksananya Hut DWP aceh - Raker DWP Aceh - Raker Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP - Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - training/ESQ		506.589.080	
5	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Banda Aceh	Terlaksananya rapat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Kegiatan	101.498.931	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		Terlaksananya rapat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan		210.683.009	
6	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Banda Aceh	Terlaksananya Study Kooperatif Lembaga Sosial - Terfasilitasinya Kegiatan Ormas/yayasan	111 Kegiatan	535.218.403	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Aceh	Terlaksananya Study Kooperatif Lembaga Sosial	111 Kegiatan	1.381.674.090	
7	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Banda Aceh	- Pelaksanaan donor Darah - Rakor TP- UKS - Raker Kesehatan	2 Kegiatan, 1 Laporan	369.199.143	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Aceh	- Pelaksanaan donor Darah - Rakor TP- UKS - Raker Kesehatan	2 Kegiatan, 1 Laporan	400.199.143	
8	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Banda Aceh	- Rakor Lembaga Keistimewaan Aceh - Terfasilitasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	60 orang 12 Bulan	507.109.736	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Aceh	- Rakor Lembaga Keistimewaan Aceh - Rakor Organisasi Kemahasiswaan PTN/PTS di Aceh - Terfasilitasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	2 rekomendasi, 1 Kegiatan	537.109.736	
	Biro Hukum				12.052.693.575					9.458.000.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Hukum	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	95%	2.323.502.878	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Biro Hukum	Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	95%	1.867.980.858	
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Hukum	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu, laporan keuangan dan laporan realisasi	95%	66.141.317	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Biro Hukum	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu, laporan keuangan dan laporan realisasi	95%	45.127.162	
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Hukum	Terpenuhinya Dokumen Renja Biro Hukum	1 Dokumen	21.715.950	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Biro Hukum	Terpenuhinya Dokumen Renja Biro Hukum	1 Dokumen	25.527.162	
b	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Hukum	Terpenuhinya Dokumen DPA Biro Hukum	1 Dokumen	10.723.750	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Biro Hukum	Terpenuhinya Dokumen DPA Biro Hukum	1 Dokumen	19.600.000	
2	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Hukum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	95%	536.200.000	Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah	Biro Hukum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaranan Aparatur	95%	924.497.510	
a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Hukum	Tersedianya 11 Tenaga Kontrak Biro Hukum	12 Bulan	536.200.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Biro Hukum	Tersedianya 11 Tenaga P3K Biro Hukum	12 Bulan	924.497.510	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Hukum	Meningkatnya Kompetensi ASN Biro Hukum sertaTerpahaminya produk hukum oleh aparaturn dan masyarakat	95%	1.128.920.514	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Biro Hukum	Meningkatnya Kompetensi ASN Biro Hukum sertaTerpahaminya produk hukum oleh aparaturn dan masyarakat	95%	702.033.000	
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum	ASN Biro Hukum yang Difasilitasi Mengikuti Diklat	5 Orang	536.200.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Biro Hukum	ASN Biro Hukum yang Difasilitasi Mengikuti Diklat	5 Orang	15.000.000	
b	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan	5 Qanun	1.229.767.000	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Tersosialisasinya Peraturan Perundang-undangan	5 Qanun	687.033.000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Hukum	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	29.393.186	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Biro Hukum	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan kantor	100%	29.393.186	
a	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum	Tersedianya ATK, makanan dan Minuman	12 Bulan	29.393.186	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Biro Hukum	Tersedianya ATK, makanan dan Minuman	12 Bulan	29.393.186	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Hukum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	121.880.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Hukum	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	95%	45.050.000	
a	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Hukum	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	121.880.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Biro Hukum	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	45.050.000	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Hukum	Terpeliharanya Kendaraan	95%	440.967.861	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Hukum	Terpeliharanya Kendaraan	95%	121.880.000	
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Hukum	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terawat Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	4 Kendaraan 12 Bulan	440.967.861	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Biro Hukum	Jumlah Kendaraan Dinas Yang Terawat Tersedianya Biaya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	4 Kendaraan 12 Bulan	121.880.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
II	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Biro Hukum	Persentase produk Hukum Kewenangan Aceh yang di fasilitasi, yang diselesaikan; Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasi/evaluasi yang dapat diselesaikan; dan Persentase dokumentasi hukum.	95%	9.729.190.697	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	Biro Hukum	Persentase produk hHukum Kewenangan Aceh yang di fasilitasi, yang diselesaikan; Persentase produk hukum kab/kota yang dikonsultasi/evaluasi yang dapat diselesaikan;	95%	7.590.019.142	
1	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Terbentuknya Qanun Aceh, Pergub, Kepgub, serta produk dan dokumen hukum lainnya, terciptanya keselarasan produk hukum di daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi, serta Ketersediaan informasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif	95%	9.729.190.697	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Biro Hukum	Terbentuknya Qanun Aceh, Pergub, Kepgub, serta produk dan dokumen hukum lainnya, terciptanya keselarasan produk hukum di daerah dengan produk hukum yang lebih tinggi, serta Ketersediaan informaasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif	95%	4.114.862.000	
a	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum	Tersedianya Prolega Aceh Tersedianya Pergub Aceh	15 Prolega 30 Pergub	1.636.027.340	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Biro Hukum	Tersedianya Prolega Aceh Tersedianya Pergub Aceh	15 Prolega 30 Pergub	1.824.939.200	
b	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum	Terselesaikannya Kepgub dan Inqub	12 Bulan	637.345.910	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Biro Hukum	Terselesaikannya Kepgub dan Inqub	12 Bulan	292.106.934	
c	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum	Tersedianya informasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif Terlaksananya Perumusan MoU/ MoA/ NPHA	12 bulan 40 MoU/ MoA/ NPHA	407.619.930	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya	Biro Hukum	Tersedianya informasi dan dokumentasi hukum yang sistematis dan inovatif Terlaksananya Perumusan MoU/ MoA/ NPHA	12 bulan 40 MoU/ MoA/ NPHA	697.815.866	
d	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Biro Hukum	Terlaksananya Fasilitasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Kab/ Kota	12 Bulan	1.356.139.306	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/ Kota	Biro Hukum	Terlaksananya Fasilitasi, Evaluasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Kab/ Kota	12 Bulan	1.300.000.000	
2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Biro Hukum	Terlaksananya Perlindungan hukum bagi aparaturn Pemerintah Aceh, perlindungan hukum bagi fakir miskin serta tersedianya laporan aksi HAM	95%	4.986.107.555	Fasilitasi Bantuan Hukum	Biro Hukum	Terlaksananya Perlindungan hukum bagi aparaturn Pemerintah Aceh, perlindungan hukum bagi fakir miskin serta tersedianya laporan aksi HAM	95%	3.475.157.142	
a	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum	Terlaksananya Pembelaan Hukum Terhadap Masyarakat Fakir Miskin	30 Kasus	3.828.591.555	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Biro Hukum	Terlaksananya Pembelaan Hukum Terhadap Masyarakat Fakir Miskin	30 Kasus	1.963.933.800	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Terselesaikannya Gugatan Terhadap kepala Daerah	12 Perkara				Terselesaikannya Gugatan Terhadap kepala Daerah	12 Perkara		
b	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum	Terselesaikannya Masalah Hukum Non Litigasi	12 Bulan	1.157.516.000	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Biro Hukum	Terselesaikannya Masalah Hukum Non Litigasi	12 Bulan	1.511.223.342	
			Tersedianya Laporan Aksi HAM	4 Laporan					Tersedianya Laporan Aksi HAM		4 Laporan
	Biro Perekonomian				3.038.500.000					3.449.762.434	
I	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Aceh	Pengendalian Inflasi Daerah	2,18	3.038.500.000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Aceh	Pengendalian Inflasi Daerah	2,18	3.449.762.434	
1	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Aceh	Tersedianya Kebijakan Perekonomian yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	85,00	1.608.978.530	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Aceh	Tersedianya Kebijakan Perekonomian yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	85,00	1.790.536.434	
a	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4	178.444.000	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	4	350.650.000	
b	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12	1.430.534.530	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	12	1.439.886.434	
2	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Aceh	Tersedianya Kebijakan Sumber Daya Alam yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	85,00	809.226.000	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Aceh	Tersedianya Kebijakan Sumber Daya Alam yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	85,00	809.226.000	
a	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	14	427.395.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	14	427.395.000	
b	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	186.430.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	2	190.931.000	
c	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3	195.401.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	3	190.900.000	
3	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Aceh	Tersedianya Kebijakan Pengembangan BUMD dan BLUD yang Sinergi	85,00	620.295.470	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Aceh	Tersedianya Kebijakan Pengembangan BUMD dan BLUD yang Sinergi	85,00	850.000.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
a	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	232.795.470	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	1	350.000.000	
b	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	177.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	1	250.000.000	
c	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	210.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Aceh	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	1	250.000.000	
Biro Pengadaan Barang dan Jasa					15.712.291.700					19.438.430.500	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100%	5.182.698.700	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100%	6.010.000.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	5.182.698.700	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya Tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa	12 Bulan	6.010.000.000	
a	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Aceh	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh	12 Bulan	5.182.698.700		Banda Aceh	Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Aceh	12 Bulan	6.010.000.000	
II	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA		Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang/Tender pengadaan barang dan jasa dengan RUP	85%	10.529.593.000	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA		Persentase Kesesuaian pelaksanaan lelang/Tender pengadaan barang dan jasa dengan RUP	85%	13.428.430.500	
1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Persentase kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang/jasa dengan RUP	85%	8.356.349.700	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		Jumlah pola kemitraan Pemerintah dengan Pelaku Usaha	1 Pola Kemitraan	8.835.619.500	
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Tercapainya kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang/jasa dengan RUP	85%	250.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Jumlah Rencana Umum Pengadaan barang/jasa (RUP) Pemerintah Aceh yang diumumkan	22000 Paket	890.897.500	
								Jumlah sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa	4 Kegiatan		

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
								Jumlah rancangan Pergub yang disusun	2 Ran Pergub		
								Terlaksananya paket pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa	22000 Paket		
b	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Tercapainya kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang/jasa dengan RUP	85%	7.919.942.700	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Terlaksananya paket pemilihan penyedia pengadaan barang dan jasa	2200 Paket	7.694.722.000	
c	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Tercapainya kesesuaian pelaksanaan lelang/tender pengadaan barang/jasa dengan RUP	85%	186.407.000	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Tersedianya laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah	3 laporan	250.000.000	
2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				508.190.000	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				900.000.000	
a	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Prov. Aceh	Persentase Pelaksanaan Pengadaan barang dan jasa secara elektronik	85%	142.634.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Banda Aceh	Jumlah pembinaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Pemerintah Aceh	23 LPSE Kab/Kota (70 orang)	300.000.000	
b	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Persentase pelaksanaan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	85%	165.556.000	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan elektronik	1 aplikasi	300.000.000	
c	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Persentase pelaksanaan Pengelolaan pengadaan barang dan jasa secara elektronik	85%	200.000.000	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi	300 Penyedia	300.000.000	
								Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna LPSE	150 Permasalahan		
								Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi	23 Kab/Kota (70 orang)		
3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Meningkatnya pelayanan bantuan hukum, Kerjasama dalam pelaksanaan PBJ dan Peningkatan SDM PBJ	85%	1.665.053.300	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa		Pengelola pengadaan barang dan jasa yang berkompetensi	4 Kompetensi	3.692.811.000	
a	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Persentase Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	85%	200.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh pengelola pengadaan barang dan jasa	4 Kompetensi	1.000.000.000	
b	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Persentase Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	85%	250.000.000	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Jumlah Peningkatan UKPBJ di Lingkup Pemerintah Aceh	24 UKPBJ	300.000.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Prov. Aceh	Persentase Pelaksanaan pembinaan kelembagaan, SDM dan Advokasi Pengadaan Barang/ Jasa	85%	1.215.053.300	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/ atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh	10 Kasus	2.392.811.000	
Biro Administrasi Pembangunan					4.451.663.332						4.457.429.877
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.335.221.290	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH					2.451.982.355
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh	Persentase peningkatan kualitas perencanaan Biro Adpem	100%	313.183.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Aceh	Persentase peningkatan kualitas perencanaan Biro Adpem	100%	328.842.150	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, RKA-DPA, LAKIP, LKPJ, LPPA Biro Adm Pembangunan	4 dokumen	185.926.110	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aceh	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, RKA-DPA, LAKIP, LKPJ, LPPA Biro Adm Pembangunan	4 dokumen	195.222.415	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aceh	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Setda Aceh	2 dokumen	127.256.890	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Aceh	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Setda Aceh	2 dokumen	133.619.735	
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aceh	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100%	212.841.200	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Aceh	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	100%	223.483.260	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aceh	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN	10 ASN	212.841.200	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Aceh	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN	10 ASN	223.483.260	
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh	Tersedianya sarana prasarana aparatur	1 tahun	1.214.673.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aceh	Tersedianya sarana prasarana aparatur	1 tahun	1.275.406.650	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	1 tahun	646.173.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Aceh	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	1 tahun	678.481.650	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	1 tahun	568.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Aceh	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	1 tahun	596.925.000	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh	Tersedianya jasa pelayanan adm perkantoran	1 tahun	172.662.090	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Aceh	Tersedianya jasa pelayanan adm perkantoran	1 tahun	181.295.195	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh	Tersedianya jasa surat menyurat, surat kabar harian dan internet kantor	1 tahun	16.686.090	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Aceh	Tersedianya jasa surat menyurat, surat kabar harian dan internet kantor	1 tahun	17.520.395	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh	Tersedianya belanja pegawai untuk pengadministrasian keuangan	1 tahun	155.976.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Aceh	Tersedianya belanja pegawai untuk pengadministrasian keuangan	1 tahun	163.774.800	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Aceh	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur kepada publik	1 tahun	421.862.000	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Aceh	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur kepada publik	1 tahun	442.955.100	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 tahun	286.862.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendraan Dinas Operasional atau Lapangan	Aceh	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	1 tahun	301.205.100	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh	Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	135.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Aceh	Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran	1 tahun	141.750.000	
	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	Aceh	Tingkat kepuasan pengakses data dan informasi	90%	2.116.442.042	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	Aceh	Tingkat kepuasan pengakses data dan informasi	90%	2.005.447.522	
	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	Persentase peningkatan kualitas evaluasi administrasi pembangunan	90%	1.421.526.217	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	Persentase peningkatan kualitas evaluasi administrasi pembangunan	90%	1.310.531.697	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Aceh	Tersedianya Laporan Hasil Identifikasi Pemabngunan Infrastruktur Strategis Sumber Dana APBA	1 laporan	137.723.000	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Aceh	Tersedianya Laporan Hasil Identifikasi Pemabngunan Infrastruktur Strategis Sumber Dana APBA	1 laporan	202.786.854	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Aceh	Tersedianya Laporan Hasil Identifikasi Pemabngunan Infrastruktur Strategis Sumber Dana APBN	1 laporan	588.899.374	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Aceh	Tersedianya Laporan Hasil Identifikasi Pemabngunan Infrastruktur Strategis Sumber Dana APBN	1 laporan	412.841.000	
	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Aceh	Tersedianya laporan pembinaan penyelenggara jasa konstruksi, pelaksanaan pembangunan sarpras permukiman dan kerjasama pemerintah swasta (KPBU)	1 laporan	694.903.843	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Aceh	Tersedianya laporan pembinaan penyelenggara jasa konstruksi, pelaksanaan pembangunan sarpras permukiman dan kerjasama pemerintah swasta (KPBU)	1 laporan	694.903.843	
	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	Persentase kualitas pelaporan pelaksanaan pembanunan	80%	694.915.825	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	Persentase kualitas pelaporan pelaksanaan pembanunan	80%	694.915.825	
	Analisis Capaian Pembangunan Daerah	Aceh	Tersedianya Laporan Hasil Analisis RPK-LRA	1 laporan	206.638.605	Analisis Capaian Pembangunan Daerah	Aceh	Tersedianya Laporan Hasil Analisis RPK-LRA	1 laporan	206.638.605	
	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	Tersedianya Laporan RPK-LRA Sumber Dana Dekon-TP APBA dan APBK	3 Laporan	271.638.610	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	Tersedianya Laporan RPK-LRA Sumber Dana Dekon-TP APBA dan APBK	3 Laporan	281.638.610	
	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Aceh	Tersedianya Laporan Perumusan Kebijakan Pengendalian Proyek Prioritas Nasional (PPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) baru	1 laporan	216.638.610	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Aceh	Tersedianya Laporan Perumusan Kebijakan Pengendalian Proyek Prioritas Nasional (PPN) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) baru	1 laporan	206.638.610	
	Biro Organisasi				2.405.125.000					2.405.125.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100%	985.150.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pemerintah	100%	985.150.000	
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh	12 Bulan	985.150.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN Setda Aceh	12 Bulan	985.150.000	
a	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Aceh	Penyediaan honorarium PPTK, Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honorarium PPK, Pejabat Pengurus Barang Milik Aceh, Tim E-Keurani, Tim Absensi Elektronik, Tim e-budgeting/SIPD/Operator SIRUP, Non PNS/Tenaga Kontrak, Penyediaan Makan Minum, Bahan Cetak/Pengadaan serta penunjang operasional pada Biro Organisasi, Penyediaan peralatan	12 Bulan	985.150.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Aceh	Penyediaan honorarium PPTK, Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu, Honorarium PPK, Pejabat Pengurus Barang Milik Aceh, Tim E-Keurani, Tim Absensi Elektronik, Tim e-budgeting/SIPD/Operator SIRUP, Non PNS/Tenaga Kontrak, Penyediaan Makan Minum, Bahan Cetak/Pengadaan serta penunjang operasional pada Biro Organisasi, Penyediaan peralatan	12 Bulan	985.150.000	
II	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase OPD yang dilakukan penataan Organisasi	80%	1.419.975.000	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI		Persentase OPD yang dilakukan penataan Organisasi	80%	1.419.975.000	
2	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik	80%	140.975.000	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik	80%	140.975.000	
a	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Aceh	Persentase perangkat Aceh yang difasilitasi/asistensi penyusunan OPD sesuai peranturan perundang-undangan	80%	193.500.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Provinsi Aceh	Persentase perangkat Aceh yang difasilitasi/asistensi penyusunan OPD sesuai peranturan perundang-undangan	80%	193.500.000	
b	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Provinsi Aceh	Persentase kab/kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	80%	193.500.000	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Provinsi Aceh	Persentase kab/kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	80%	193.500.000	
c	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Aceh	Jumlah SKPA yang difasilitasi/ evaluasi penyusunan analisa jabatan	20 SKPA/Unit Kerja	261.375.000	Penataan Analisis Jabatan	Provinsi Aceh	Jumlah SKPA yang difasilitasi/ evaluasi penyusunan analisa jabatan	20 SKPA/Unit Kerja	261.375.000	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik	100%	1.279.000.000	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik	100%	1.279.000.000	
a	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Aceh	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja Reformasi Birokrasi Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan/evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	101 Orang 15 Kab/Kota 10 Kab/Kota	263.250.000	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Provinsi Aceh	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja Reformasi Birokrasi Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan/evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	101 Orang 15 Kab/Kota 10 Kab/Kota	263.250.000	
b	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Aceh	Jumlah dokumen SAKIP	9 Dokumen	391.000.000	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Provinsi Aceh	Jumlah dokumen SAKIP	9 Dokumen	391.000.000	
c	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Aceh	Jumlah peserta pada UPTD/Cabdin yang mengikuti Workshop/sosialisasi pengembangan budaya kerja	90 peserta	131.750.000	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Provinsi Aceh	Jumlah peserta pada UPTD/Cabdin yang mengikuti Workshop/sosialisasi pengembangan budaya kerja	90 peserta	131.750.000	
d	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Aceh	Jumlah SKPA/Cabdin/UPTD yang mengikuti Pendalaman Teknis/Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPA/ Cabdin/UPTD Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Pendalaman Teknis/Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis	30 SKPA 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota	221.000.000	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Provinsi Aceh	Jumlah SKPA/Cabdin/UPTD yang mengikuti Pendalaman Teknis/Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPA/ Cabdin/UPTD Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Pendalaman Teknis/Sosialisasi Tata Naskah Dinas Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis	30 SKPA 23 Kab/Kota 23 Kab/Kota	221.000.000	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi Pelayanan Publik	19 Kab/Kota				Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi Pelayanan Publik	19 Kab/Kota		

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting		
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)		
e	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Aceh	Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi pendalaman teknis/fasilitasi penginputan SIPP	21 Kab/Kota	272.000.000	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Provinsi Aceh	Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi pendalaman teknis/fasilitasi penginputan SIPP	21 Kab/Kota	272.000.000			
			Jumlah SKPA/Cabdin/UPTD yang difasilitasi penyusunan standar pelayanan	20 SKPA					Jumlah SKPA/Cabdin/UPTD yang difasilitasi penyusunan standar pelayanan		20 SKPA		
			Jumlah SKPA yang mengikuti Workshop pelaksanaan Survei Keputusan Masyarakat (SKM)	15 SKPA					Jumlah SKPA yang mengikuti Workshop pelaksanaan Survei Keputusan Masyarakat (SKM)		15 SKPA		
	Biro Umum				173.472.793.457					161.184.728.870			
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				173.472.793.457	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				161.184.728.870			
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				88.382.209.338	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				80.674.307.284			
a	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	B. Aceh	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	682 ASN/ KDH/ WKD H	78.194.297.338	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	B. Aceh	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	682 ASN/ KD	71.694.297.338			
b	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	B. Aceh	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	8 Kegiatan	9.054.305.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	B. Aceh	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	8 Kegiatan	8.098.802.946			
c	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	B. Aceh	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	26 Laporan	1.133.607.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	B. Aceh	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	26 Laporan	881.207.000			
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah				10.285.782.426	Administrasi Umum Perangkat Daerah				8.685.782.426			
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B. Aceh	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Tahun	1.035.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	B. Aceh	Jumlah paket komponen instalasi/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Tahun	1.035.000.000			
b	Penyediaan peralatan rumah tangga	B. Aceh	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Tahun	4.978.090.322	Penyediaan peralatan rumah tangga	B. Aceh	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Tahun	3.378.090.322			
c	Penyediaan bahan laogistik kantor	B. Aceh	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Tahun	4.272.692.104	Penyediaan bahan laogistik kantor	B. Aceh	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	1 Tahun	4.272.692.104			
3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.623.850.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				3.623.850.000			
a	Pengadaan Mebel	B. Aceh	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Tahun	819.850.000	Pengadaan Mebel	B. Aceh	Jumlah paket mebel yang disediakan	1 Tahun	819.850.000			

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
b	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	B. Aceh	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Tahun	2.804.000.000	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	B. Aceh	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1 Tahun	2.804.000.000	
4	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				34.531.097.877	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				33.544.765.874	
a	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	8 Kegiatan	3.340.003.823	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	8 Kegiatan	2.440.003.823	
b	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	3 Rekening	5.500.246.620	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	3 Rekening	5.500.246.620	
c	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	8 Kegiatan	405.332.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	8 Kegiatan	344.000.000	
d	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	7 Kegiatan	25.285.515.434	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	B. Aceh	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	7 Kegiatan	25.260.515.431	
5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah				25.828.448.297					21.154.547.235	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	B. Aceh	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	403 unit	8.224.825.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	B. Aceh	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	403 unit	8.224.825.000	
	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	B. Aceh	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8 Gedung	17.603.623.297	Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	B. Aceh	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	8 Gedung	12.929.722.235	
6	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				8.570.153.218	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				11.235.223.750	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan Wa KDH	B. Aceh	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	2.670.153.218	Penyediaan Gaji dan Tunjangan KDH dan Wa KDH	B. Aceh	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	4.745.223.750	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan Wa KDH	B. Aceh	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional KDH dan Wa KDH	1 Tahun	5.900.000.000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional KDH dan Wa KDH	B. Aceh	Jumlah orang yang menerima dana penunjang operasional KDH dan Wa KDH	1 Tahun	6.490.000.000	
7	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				2.251.252.301	Fasilitasi Kerumahtangaan Sekretariat Daerah				2.266.252.301	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	B. Aceh	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	1 Tahun	2.251.252.301	Penyediaan kebutuhan rumah tangga Sekretariat Daerah	B. Aceh	Jumlah paket kebutuhan rumah tangga sekretariat daerah yang disediakan	1 Tahun	2.266.252.301	
	Biro Administrasi Pimpinan				18.351.000.000					18.351.000.000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Provinsi Aceh	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu	100%	18.351.000.000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Provinsi Aceh	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu	100%	18.351.000.000	
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	10 Dokumen	172.400.000	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	10 Dokumen	172.400.000	
a	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	172.400.000	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dok	172.400.000	
2	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Pelayanan administrasi kepegawaian Setda Provinsi	1 Dokumen	555.000.000	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Pelayanan administrasi kepegawaian Setda Provinsi	1 Dokumen	555.000.000	
a	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	433.776.000	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5 Dok	433.776.000	
b	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Org	121.224.000	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	8 Org	121.224.000	
3	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	1 Dokumen	105.600.000	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	1 Dokumen	105.600.000	
a	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Provinsi Aceh	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	105.600.000	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan	Provinsi Aceh	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4 Paket	105.600.000	
4	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.822.314.912	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Aceh	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 Dokumen	1.822.314.912	
a	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dok	1.822.314.912	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Provinsi Aceh	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 Dok	1.822.314.912	
5	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terpenuhinya Kebutuhan Materi dan Komunikasi Pimpinan	1 Dokumen	12.762.954.688	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terpenuhinya Kebutuhan Materi dan Komunikasi Pimpinan	1 Dokumen	12.762.954.688	
a	- Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	800 Dokumen	1.587.720.000	- Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	800 Dokumen	1.587.720.000	
b	- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	9.511.240.528	- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	9.511.240.528	

NO	RANWAL RKPA					RANKHIR RKPA					Catatan Penting
	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	PROGRAM/KEGIATAN	Lokasi	INDIKATOR	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
c	- Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi	1 Laporan	1.663.994.160	- Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi	1 Laporan	1.663.994.160	
6	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Pimpinan	4 Dokumen	2.932.730.400	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan		Terlaksananya Kegiatan Keprotokolan Pimpinan	4 Dokumen	2.932.730.400	
a	- Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi Aceh	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Dokumen	1.717.895.400	- Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi Aceh	Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	2 Dokumen	1.717.895.400	
b	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Aceh	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Dokumen	1.159.875.000	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Aceh	Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1 Dokumen	1.159.875.000	
c	- Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan	1 Dokumen	54.960.000	- Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Provinsi Aceh	Terlaksananya Pengelolaan Hubungan	1 Dokumen	54.960.000	
	TOTAL				244.533.645.875	TOTAL				237.272.201.144	

Banda Aceh, Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH ACEH


BUSTAML SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670722 199603 1 002

TABEL 2.5 (TC-32)
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN/MASYARAKAT TAHUN 2024
PROVINSI ACEH

Instansi : Sekretariat Daerah Aceh

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

Banda Aceh, Januari 2024
 SEKRETARIS DAERAH ACEH

Bustami

BUSTAMI, SE, M.Si
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19670722 199603 1 002

Table 3.3 (TC-33)

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPA TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PROVINSI ACEH

Nama SKPA : Sekretariat Daerah Aceh

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	URUSAN UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4 01	SEKRETARIAT DAERAH				195.661.139.311				213.497.665.909
	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah				5.150.000.000				5.253.000.001
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				1.562.065.477				1.593.306.787
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Fasilitasi pengembangan SDM Biro Tapem	Aceh	1 Sub Kegiatan	47.264.000			1 Sub Kegiatan	48.209.280
	<i>Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Fasilitasi Bimtek/Pelatihan Bagi ASN Biro Pemotda</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	47.264.000			<i>1 Dokumen</i>	48.209.280
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	Aceh	2 Sub Kegiatan	181.273.767			2 Sub Kegiatan	184.899.243
	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	<i>Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	82.992.427			<i>1 Tahun</i>	84.652.276
	<i>Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</i>	<i>Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	98.281.340			<i>1 Tahun</i>	100.246.967
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran	Aceh	2 Sub Kegiatan	956.302.000			2 Sub Kegiatan	975.428.040
	<i>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>	<i>Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	35.574.000			<i>1 Tahun</i>	36.285.480
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	<i>Peningkatan pelayanan Adm. Perkantoran</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	920.728.000			<i>1 Tahun</i>	939.142.560
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Sarana Prasarana Perkantoran	Aceh	2 Sub Kegiatan	377.225.710			2 Sub Kegiatan	384.770.224
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	<i>Fasilitasi pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	199.090.000			<i>1 Tahun</i>	203.071.800
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	<i>Fasilitasi pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya</i>	<i>Aceh</i>	<i>1 Tahun</i>	178.135.710			<i>1 Tahun</i>	181.698.424
	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	Nilai/Status LPPA	Aceh	2,9500/tinggi	3.587.934.523			2,8500/tinggi	3.659.693.214
	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	Rasio penyelesaian pemasangan PBU terhadap jumlah kebutuhan PBU pasca Permendagri Batas Daerah	Aceh	9,195	1.874.905.994			4,6	1.912.404.114

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah dokumen administrasi kebijakan pemerintah	Aceh	3 Dokumen	100.000.000			3 Dokumen	102.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah dokumen administrasi pemerintahan umum	Aceh	4 Dokumen	100.000.000			4 Dokumen	102.000.000
	Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah dokumen fasilitasi penataan wilayah	Aceh	4 Dokumen	1.674.905.994			4 Dokumen	1.708.404.114
	Pelaksanaan Otonomi Daerah	Nilai/Status LPPA	Aceh	2,9500/tinggi	713.028.529			2,8500/tinggi	727.289.100
	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah dokumen fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD	Aceh	6 Dokumen	300.000.000			6 Dokumen	306.000.000
	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah dokumen pengembangan otonomi dan penataan urusan	Aceh	5 Dokumen	200.000.000			5 Dokumen	204.000.000
	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintah	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintah	Aceh	3 Dokumen	213.028.529			3 Dokumen	217.289.100
	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Persentase Fasilitasi Kerjasama Daerah	Aceh	20%	1.000.000.000			40%	1.020.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah	Jumlah dokumen kesepakatan bersama antar pemerintah	Aceh	6 Dokumen	500.000.000			6 Dokumen	510.000.000
	Fasilitasi Kerjasama Badan Usaha/Swasta	Jumlah dokumen kesepakatan bersama dengan badan usaha/swasta	Aceh	2 Dokumen	200.000.000			2 Dokumen	204.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama	Jumlah dokumen laporan hasil evaluasi kerjasama daerah	Aceh	3 Laporan	300.000.000			3 Laporan	306.000.000
	Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat				10.102.684.342				11.243.462.667
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				2.138.545.207				2.132.971.503
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.138.545.207				2.132.971.503
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya administrasi perkantoran	Banda Aceh	12 Bulan	895.370.000	DAU		12 Bulan	848.403.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Pelayanan Jasa Administrasi Keuangan dan Pelayanan	Banda Aceh	12 Bulan	454.467.927	DAU		12 Bulan	736.285.243
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya persediaan barang cetakan dan pengadaan administrasi perkantoran	Banda Aceh	12 Bulan	212.200.000	DAU		12 Bulan	36.842.760
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Koordinasi Antar SKPA	Banda Aceh	12 Bulan	167.776.000	DAU		12 Bulan	264.917.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya kendaraan Dinas yang maksimal	Banda Aceh	12 Bulan	196.531.280	DAU		12 Bulan	121.445.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpeliharanya aset dan dan sarana perkantoran	Banda Aceh	12 Bulan	212.200.000	DAU		12 Bulan	125.078.400
	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT				7.964.139.135				9.110.491.164
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spritual	Tingkat Kepuasan Jamah Haji terhadap pelayanan Tim TPHD dan Terlaksanannya Seleksi Petugas Haji Daerah Aceh	Banda Aceh	34 orang	2.931.309.224	PAA		34 orang	4.758.731.136
		Terjalinya silaturahmi dan keja sama antara Pemerintah Aceh dengan Nadhir Waqaf	Banda Aceh	30 orang		PAA		30 orang	
	Fasilitasi Kelembagaan Bima Spritual	Terselenggaranya peribadatan dan Pengajian di Mushalla At-Taubah Setda Aceh, Mushalla Meuligoe Gubernur Aceh dan Mushalla Meuligoe Wakil Gubernur Aceh	Banda Aceh	3 Mushalla	1.099.948.170	PAA		3 Mushalla	1.676.856.866
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	-Fasilitasi Rancangan pergub Aceh tentang kurikulum Pendidikan Aceh -Terselenggaranya FGD Pemetaan dan pengembangan Pemuda Kreatif -Terselenggaranya Rakor Pengembangan Pemuda Kreatif	Aceh	5 Kegiatan 2 Pergub	1.502.050.000	DAU		5 Kegiatan 2 Pergub	279.295.731
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	-Terlaksananya Hut DWP aceh - Raker DWP Aceh - Raker Peningkatan Kapasitas Pengurus DWP - Rakor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak - training/ESQ	Banda Aceh	5 kegiatan	452.200.697	DAU		5 kegiatan	990.606.828
	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Terlaksananya rapat Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Banda Aceh	25 orang	43.000.000	DAU		25 orang	101.498.931

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Terlaksananya Study Kooperatif Lembaga Sosial - Terfasilitasinya Kegiatan Ormas/yayasan	Banda Aceh	111 Kegiatan	214.081.542	DAU		30 orang	480.318.403
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	- Pelaksanaan donor Darah - Rakor TP- UKS - Raker Kesehatan	Banda Aceh	1 Laporan 2 Kegiatan	775.900.000	DAU		1 Laporan 2 Kegiatan	352.799.143
	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	- Rakor Lembaga Keistimewaan Aceh - Terfasilitasi Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan	Banda Aceh	2 rekomendasi 1 Kegiatan	945.649.502	DAU		2 rekomendasi 2 Kegiatan	470.384.126
	Biro Hukum				9.458.000.000				10.403.800.000
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Biro Hukum		1.867.980.858	APBA			2.054.778.944
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Biro Hukum	0,9	45.127.162	APBA		0,95	49.639.878
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	Biro Hukum	0,9	924.497.510	APBA		0,95	1.016.947.261
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Aparatur Yang Memadai	Biro Hukum	0,9	702.033.000	APBA		0,95	772.236.300
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Alat Perlengkapan Kantor	Biro Hukum	0,9	29.393.186	APBA		0,95	32.332.505
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Biro Hukum	0,9	45.050.000	APBA		0,95	49.555.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang Milik Daerah Yang Siap Pakai	Biro Hukum	0,9	121.880.000	APBA		0,95	134.068.000
	Program Fasilitasi Dan Koordinasi Hukum		Biro Hukum		7.590.019.142	APBA			8.349.021.056
	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan	Rasio Produk Hukum Yang Difasilitasi	Biro Hukum	0,9	4.114.862.000	APBA		0,95	4.526.348.200
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Rasio Permohonan Bantuan Hukum Terhadap Yang Difasilitasi	Biro Hukum	0,9	3.475.157.142	APBA		0,95	3.822.672.856
	Biro Perekonomian				3.832.814.783				3.589.132.836
	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Pengendalian Inflasi Daerah	Aceh	2,15	3.832.814.783	APBA		2,12	3.589.132.836

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian	Tersedianya Kebijakan Perekonomian yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Aceh	85,00	1.826.347.163	APBA		85,00	1.862.874.106
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro</i>	<i>Aceh</i>	<i>4</i>	<i>357.663.000</i>	<i>APBA</i>		<i>4</i>	<i>364.816.260</i>
	<i>Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro</i>	<i>Aceh</i>	<i>10</i>	<i>1.468.684.163</i>	<i>APBA</i>		<i>10</i>	<i>1.498.057.846</i>
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam	Tersedianya Kebijakan Sumber Daya Alam yang Sinergis dan Mendukung Pengentasan Kemiskinan	Aceh	85,00	1.139.467.620	APBA		85,00	841.918.730
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan</i>	<i>Aceh</i>	<i>14</i>	<i>750.000.000</i>	<i>APBA</i>		<i>14</i>	<i>444.661.758</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup</i>	<i>Aceh</i>	<i>2</i>	<i>194.749.620</i>	<i>APBA</i>		<i>2</i>	<i>198.644.612</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air</i>	<i>Aceh</i>	<i>3</i>	<i>194.718.000</i>	<i>APBA</i>		<i>3</i>	<i>198.612.360</i>
	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD	Tersedianya Kebijakan Pengembangan BUMD dan BLUD yang Sinergi	Aceh	85,00	867.000.000	APBA		85,00	884.340.000
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha</i>	<i>Aceh</i>	<i>1</i>	<i>357.000.000</i>	<i>APBA</i>		<i>1</i>	<i>364.140.000</i>
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi</i>	<i>Aceh</i>	<i>1</i>	<i>255.000.000</i>	<i>APBA</i>		<i>1</i>	<i>260.100.000</i>

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Aceh	1	255.000.000	APBA		2	260.100.000
	Biro Pengadaan Barang dan Jasa				19.438.430.500				20.681.273.550
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan Pemerintah	Banda Aceh	100%	6.010.000.000			100%	6.010.000.000
	Kegiatan Administrasi Keuangan				6.010.000.000			100%	6.010.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya Tunjangan ASN Biro Pengadaan Barang dan Jasa	Banda Aceh	12 Bulan	6.010.000.000	PAD		100%	6.010.000.000
	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	Persentase kesesuaian pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa dengan RUP	Banda Aceh	85%	13.428.430.500			90%	14.671.273.550
	Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa				8.835.619.500				9.719.181.450
	Sub Kegiatan Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Rencana Umum Pengadaan (RUP) Barang/Jasa Pemerintah Aceh yang diumumkan	Banda Aceh	22.000 Paket / 55 SKPA	890.897.500	PAD		22.000 Paket / 55 SKPA	979.987.250
Jumlah pola kemitraan pemerintah dengan pelaku usaha		1 Pola Kemitraan		1 Pola Kemitraan					
Jumlah sosialisasi peraturan bidang pengadaan barang dan jasa		3 Kegiatan		3 Kegiatan					
Jumlah Rancangan Pergub yang disusun		2 Rancangan Pergub		2 Rancangan Pergub					
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah paket pemilihan penyedia secara tender dan non tender terselesaikan	Banda Aceh	2.300 Paket	7.694.722.000	PAD		2.300 Paket	8.464.194.200
		Persentase pelayanan administrasi dan pengadaan barang dan jasa		85%				90%	
	Sub Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Banda Aceh	3 laporan	250.000.000	PAD		3 laporan	275.000.000
	Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik				900.000.000				990.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024			
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah pembinaan pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Lingkup Pemerintah Aceh	Banda Aceh	23 Kab/Kota(70 orang)	300.000.000	PAD		23 Kab/Kota(70 orang)	330.000.000		
	Sub Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah aplikasi sistem pendukung layanan pengadaan elektronik	Banda Aceh	1 aplikasi	300.000.000	PAD		1 aplikasi	330.000.000		
	Sub Kegiatan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyedia yang mendaftar untuk diverifikasi Jumlah standarisasi LPSE yang dipenuhi Jumlah penyelesaian permasalahan pengguna layanan pengadaan secara elektronik	Banda Aceh	300 penyedia 23 Kab/Kota (70 orang) 150 permasalahan	300.000.000	PAD		300 penyedia 23 Kab/Kota (70 orang) 150 permasalahan	330.000.000		
	Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa				3.692.811.000				3.962.092.100		
	Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah kompetensi yang dimiliki oleh pengelola pengadaan barang dan jasa		4 kompetensi	1.000.000.000	PAD		4 kompetensi	1.000.000.000		
	Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Peningkatan Kelembagaan UKPBJ di Lingkup Pemerintah Aceh	Banda Aceh	24 UKPBJ	300.000.000	PAD		24 UKPBJ	330.000.000		
	Sub Kegiatan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah penyelesaian kasus pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh Jumlah penyelesaian pengaduan/sanggah pengadaan barang dan jasa Pemerintah Aceh Jumlah peserta Bimtek pengguna SPSE e-Purchasing, e-Tender, e-Penunjukan Langsung, e-Pengadaan Langsung, SIRUP dan Sistem Pendukung Pengadaan	Banda Aceh	10 kasus 25 pengaduan/sanggah 5 Kegiatan / 700 orang	2.392.811.000	PAD		10 kasus 25 pengaduan/sanggah 5 Kegiatan / 700 orang	2.632.092.100		
	Biro Administrasi Pembangunan				6.611.942.417				7.273.136.659		
4	01	01				2.335.221.290			2.568.743.419		
4	01	01	01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas perencanaan Biro Adpem	Aceh	100%	313.183.000	DAU	100%	344.501.300

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4 01 01 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, RKA-DPA, LAKIP, LKPJ, LPPA Biro Adm Pembangunan	Aceh	4 dokumen	185.926.110	DAU		4 dokumen	204.518.721
4 01 01 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya dokumen RKA dan DPA Setda Aceh	Aceh	2 dokumen	127.256.890	DAU		2 dokumen	139.982.579
4 01 01 05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memenuhi kompetensi	Aceh	100%	212.841.200	DAU		100%	234.125.320
4 01 01 05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terfasilitasinya pendidikan dan pelatihan bagi ASN	Aceh	10 ASN	212.841.200	DAU		10 ASN	234.125.320
4 01 01 06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya sarana prasarana aparatur	Aceh	1 tahun	1.214.673.000	DAU		1 tahun	1.336.140.300
4 01 01 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya kebutuhan logistik kantor	Aceh	1 tahun	646.173.000	DAU		1 tahun	710.790.300
4 01 01 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya kebutuhan cetak dan penggandaan	Aceh	1 tahun	568.500.000	DAU		1 tahun	625.350.000
4 01 01 08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan adm perkantoran	Aceh	1 tahun	172.662.090	DAU		1 tahun	189.928.299
4 01 01 08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya jasa surat menyurat, surat kabar harian dan internet kantor	Aceh	1 tahun	16.686.090	DAU		1 tahun	18.354.699
4 01 01 08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya belanja pegawai untuk pengadministrasian keuangan	Aceh	1 tahun	155.976.000	DAU		1 tahun	171.573.600
4 01 01 09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Peningkatan kualitas pelayanan aparatur kepada publik	Aceh	1 tahun	421.862.000	DAU		1 tahun	464.048.200
4 01 01 09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	Aceh	1 tahun	286.862.000	DAU		1 tahun	315.548.200
4 01 01 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya jasa perbaikan dan peralatan kerja sebagai penunjang pelayanan administrasi perkantoran	Aceh	1 tahun	135.000.000	DAU		1 tahun	148.500.000
4 01 08 01	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat kepuasan pengakses data dan informasi	Aceh	90%	4.276.721.127	DAU		90%	4.704.393.240
4 01 08 01	Kegiatan Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Persentase peningkatan kualitas evaluasi administrasi pembangunan	Aceh	90%	3.076.486.627	DAU		90%	3.384.135.290
4 01 08 01 01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Tersedianya Laporan Hasil Identifikasi Pemabngunan Infrastruktur Strategis Sumber Dana APBA	Aceh	1 laporan	501.290.627	DAU		1 laporan	551.419.690

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01 08 01 02	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Aceh	1 laporan	1.072.928.000	DAU		1 laporan	1.180.220.800
4	01 08 01 03	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Wilayah	Aceh	1 laporan	1.502.268.000	DAU		1 laporan	1.652.494.800
4	01 08 02	Kegiatan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	80%	1.200.234.500	DAU		80%	1.320.257.950
4	01 08 02 01	Analisis Capaian Pembangunan Daerah	Aceh	1 laporan	348.156.500	DAU		1 laporan	382.972.150
4	01 08 02 02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Aceh	3 Laporan	540.958.000	DAU		3 Laporan	595.053.800
4	01 08 02 03	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Aceh	1 laporan	311.120.000	DAU		2 laporan	342.232.000
		Biro Organisasi			2.860.000.000				2.860.000.000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI			985.150.000				985.150.000
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			985.150.000				985.150.000
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Provinsi Aceh	12 Bulan	985.150.000	DAU		12 Bulan	985.150.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	Persentase OPD yang dilakukan penataan Organisasi			1.874.850.000				1.874.850.000
	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik			595.850.000				595.850.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	Persentase perangkat Aceh yang difasilitasi/asistensi penyusunan OPD sesuai peranturan perundang-undangan	Provinsi Aceh	80%	140.975.000	DAU		80%	140.975.000
	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kab/Kota	Persentase kab/kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan OPD sesuai peraturan perundang-undangan	Provinsi Aceh	80%	193.500.000	DAU		80%	193.500.000
	Penataan Analisis Jabatan	Jumlah SKPA yang difasilitasi/evaluasi penyusunan analisa jabatan	Provinsi Aceh	20 SKPA/Unit Kerja	261.375.000	DAU		20 SKPA/Unit Kerja	261.375.000
	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penataan Kelembagaan, Analisis Jabatan, Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Kinerja, Tatalaksana Pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik			1.279.000.000				1.279.000.000
	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Jumlah peserta yang mengikuti rapat kerja Reformasi Birokrasi Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang dievaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Jumlah Pemerintah Kab/Kota yang difasilitasi/asistensi penyusunan/evaluasi Road Map Reformasi Birokrasi	Provinsi Aceh	101 Orang 15 Kab/Kota 10 Kab/Kota	263.250.000	DAU		101 Orang 15 Kab/Kota 10 Kab/Kota	263.250.000
	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah dokumen SAKIP	Provinsi Aceh	9 Dokumen	391.000.000	DAU		9 Dokumen	391.000.000
	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah peserta pada UPTD/Cabdin yang mengikuti Workshop/sosialisasi pengembangan budaya kerja	Provinsi Aceh	90 peserta	131.750.000	DAU		90 peserta	131.750.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan	Jumlah SKPA/Cabdin/UPTD yang mengikuti Pendalaman Teknis/Fasilitasi Penyusunan dan Evaluasi SOP SKPA/Cabdin/UPTD	Provinsi Aceh	30 SKPA	221.000.000	DAU		30 SKPA	221.000.000
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Pendalaman Teknis/Sosialisasi Tata Naskah Dinas		23 Kab/Kota				23 Kab/Kota	
		Jumlah Kabupaten/Kota yang mengikuti Workshop Pendampingan Teknis Penyusunan Peta Proses Bisnis		23 Kab/Kota				23 Kab/Kota	
	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Kabupaten/Kota yang dilakukan Evaluasi Pelayanan	Provinsi Aceh	19 Kab/Kota	272.000.000	DAU		19 Kab/Kota	272.000.000
		Jumlah Pemerintah Kabupaten/Kota yang difasilitasi pendalaman teknis/fasilitasi pelayanan		21 Kab/Kota				21 Kab/Kota	
		Jumlah SKPA/Cabdin/UPTD yang difasilitasi penyusunan standar pelayanan		20 SKPA				20 SKPA	
		Jumlah SKPA yang mengikuti Workshop pelaksanaan Survei Keputusan Masyarakat (SKM)		15 SKPA				15 SKPA	
	Biro Umum				119.856.267.269				131.841.893.996
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi				119.856.267.269				131.841.893.996
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				468.512.000				515.363.200
	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	B. Aceh	3 Dokumen	468.512.000			3 Dokumen	515.363.200
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				94.352.537.269				103.787.790.996
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	B. Aceh	682 ASN/KDH/WKDH	86.352.519.269			682 ASN/KDH/WKDH	94.987.771.196
	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	B. Aceh	8 Kegiatan	6.682.267.000			8 Kegiatan	7.350.493.700
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu	B. Aceh	26 Laporan	1.317.751.000			26 Laporan	1.449.526.100

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				25.035.218.000				27.538.739.800
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	B. Aceh	8 Kegiatan	2.530.701.000			8 Kegiatan	2.783.771.100
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	B. Aceh	3 Rekening	6.050.271.000			3 Rekening	6.655.298.100
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	B. Aceh	8 Kegiatan	705.241.000			8 Kegiatan	775.765.100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah	B. Aceh	7 Kegiatan	15.749.005.000			7 Kegiatan	17.323.905.500
	Biro Administrasi Pimpinan				18.351.000.000				20.351.966.200
4 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Penyelesaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah secara baik dan tepat waktu	Provinsi Aceh	1 Dokumen	18.351.000.000			1 Dokumen	20.351.966.200
4 01 01 1.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi perangkat daerah	Provinsi Aceh	10 Dokumen	172.400.000			8 Dokumen	220.000.000
4 01 01 1.01 01	- Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Provinsi Aceh	10 Dok	172.400.000	SPAA		100%	220.000.000
4 01 01 1.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Pelayanan administrasi kepegawaian Setda Provinsi	Provinsi Aceh	1 Dokumen	555.000.000			8 Dokumen	609.646.400
4 01 01 1.05 03	- Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Provinsi Aceh	5 Dok	433.776.000	SPAA		100%	476.300.000
4 01 01 1.05 09	- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Provinsi Aceh	8 Org	121.224.000	SPAA		100%	133.346.400
4 01 01 1.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Kebutuhan Administrasi Umum	Provinsi Aceh	8 Dokumen	105.600.000			8 Dokumen	116.160.000
4 01 01 1.06 02	- Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	Provinsi Aceh	100%	105.600.000	SPAA		100%	116.160.000
4 01 01 1.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Aceh	18 Dokumen	1.822.314.912			18 Dokumen	2.030.946.400
4 01 01 1.08 04	- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Pelayanan Umum Biro	Provinsi Aceh	18 Dok	1.822.314.912	SPAA		18 Dok	2.030.946.400
4 01 01 1.13	Kegiatan Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan	Terpenuhinya Kebutuhan Materi dan Komunikasi Pimpinan	Provinsi Aceh		12.762.954.688				14.149.250.000
4 01 01 1.13 01	- Sub Kegiatan Penyiapan Materi Pimpinan	Materi Pimpinan Tersedia dengan Baik	Provinsi Aceh	2 Dokumen	1.587.720.000	SPAA		2 Dokumen	1.746.492.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	RENCANA TAHUN 2023				Catatan Penting	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2024	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	01 01 1.13 02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Provinsi Aceh	2 Dokumen	9.511.240.528	SPAA		2 Dokumen	10.462.364.500
4	01 01 1.13 03	- Sub Kegiatan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Provinsi Aceh	3 Dokumen	1.663.994.160	SPAA		3 Dokumen	1.940.393.500
4	01 01 1.14	Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan	Provinsi Aceh	4 Dokumen	2.932.730.400			4 Dokumen	3.225.963.400
4	01 01 1.14 01	- Sub Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Provinsi Aceh	2 Dokumen	1.717.895.400	SPAA		2 Dokumen	1.889.644.900
4	01 01 1.14 02	- Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Provinsi Aceh	1 Dokumen	1.159.875.000	SPAA		1 Dokumen	1.275.862.500
4	01 01 1.14 03	- Sub Kegiatan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Provinsi Aceh	1 Dokumen	54.960.000	SPAA		1 Dokumen	60.456.000
		JUMLAH			195.661.139.311				213.497.665.909

Banda Aceh, Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH ACEH

BUSTAML, SE, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19670722 199603 1 002



PANCACITA
PEMERINTAH ACEH